



Laporan Kinerja Balai Besar POM di Manado TAHUN 2019

 [bbpom_manado](https://www.instagram.com/bbpom_manado)

 [BPOMManado](https://twitter.com/BPOMManado)

 [BPOM Manado](https://www.facebook.com/BPOMManado)

 [0812 8196 9799](https://wa.me/081281969799)

 ulpk_mdo@yahoo.co.id

 www.bbpom-manado.id



KATA PENGANTAR



Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-NYA kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Tahun Anggaran 2019 dan ini merupakan bentuk tindak lanjut pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015 – 2019.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BBPOM di Manado ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum dan fungsi pemerintah dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BBPOM di Manado Tahun 2019 merupakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pada tahun 2019, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami berharap melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kinerja pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan, baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun perencanaan kinerja BBPOM di Manado.

Manado, 19 Februari 2020
Kepala BBPOM di Manado,

Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt., M.Kes
NIP. 19630407 198903 2 001



IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BBPOM di Manado merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Rencana strategis tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis BBPOM di Manado Tahun 2015-2019.

Dalam mengukur capaian kinerja , pendekatan balanced scorecard sudah menggunakan 4 perspektif, yaitu *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process* dan *Learning & Growth*. Dari perspektif tersebut diturunkan menjadi 6 sasaran kegiatan yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado.
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado.
6. Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 16 indikator kegiatan yang merupakan indikator kinerja Utama (IKU) pada tahun 2019 :

1. 2 (dua) sasaran kegiatan yang ditetapkan memberikan hasil “Sangat Baik” (>110%), yaitu pada sasaran kegiatan pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara” sebesar 112,78%, sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Utara” sebesar 113.21%,

2. 2 (dua) sasaran kegiatan kelima tercapai dengan hasil “Baik” (>90%) yaitu “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado dan sasaran kegiatan keenam “Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019”.
3. 2 (dua) sasaran kegiatan tercapai dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” (>120%) yaitu pada sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado” dan sasaran kegiatan ketiga “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado.
4. Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Manado pada tahun 2019 antara 92.10% sampai dengan 128,31%. Capaian indikator kinerja terendah pada “Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019”

Dalam mendukung capaian kinerja tahun 2019 dengan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 38.404.651.000,00, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 BBPOM di Manado mendapatkan tambahan anggaran untuk keperluan Diklat Dasar CPNS TA 2019 oleh Direktorat Jendral Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 39.049.251.000,00, kemudian pada tanggal 13 September 2019 BBPOM di Manado kembali mendapatkan tambahan anggaran untuk Revisi Belanja Pegawai sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 39.801.690.000,00. Dari pagu yang anggaran Rp.39.801.690.000,00 terealisasi sebesar Rp. 39.149.390.497,00 atau 98,36% Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 113.02% menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran. Namun masih perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus untuk memperbaiki kinerja ditahun mendatang, sehingga diharapkan terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BBPOM di Manado pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja BBPOM di Manado secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

HIGHLIGHT

Selama tahun 2019, BBPOM di Manado menerima beberapa penghargaan yaitu :



1. Penghargaan dari Badan POM Juara II kategori Pegawai Berprestasi 2018 tingkat nasional. Dalam hal ini diperoleh oleh pegawai Bidang Penindakan.



2. Penghargaan dari Badan POM Juara I Lomba Inovasi kategori Inovasi Pegawai dan telah dilaksanakan yaitu Sistem Notifikasi Ijin Edar Elektronik (SI NONI), inovasi tersebut merupakan salah satu penunjang dari beberapa pendekatan sistem pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Manado dalam upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2018 hingga tahun 2019 terus meningkat dan pada tahun 2019 menduduki peringkat pertama nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Institusi	1
1.2 Struktur Organisasi.....	4
1.3 Aspek Strategis Organisasi	10
1.4 Analisis Lingkungan Strategis	12
1.5 Isu Strategis	16
BAB II. KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	22
2.1 Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019.....	22
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.2 Realisasi Anggaran.....	104
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Manado	5
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	6
Gambar 1.3	Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 1.4	Wilayah Kerja BBPOM di Manado dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	14
Gambar 2.1	Peta Strategi Level II BBPOM di Manado.....	24
Gambar 2.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	28
Gambar 3.1	Kategori Capaian Kinerja	30
Gambar 3.2	Perbandingan Nilai IPOM dengan Tahun Sebelumnya	309
Gambar 3.3	Perbandingan Nilai IPOM dalam Satu Cluster.....	40
Gambar 3.4	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	42
Gambar 3.5	Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan Tahun Sebelumnya.....	43
Gambar 3.6	Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dalam Satu Cluster	43
Gambar 3.7	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara.....	45
Gambar 3.8	Perbandingan Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat dengan Tahun Sebelumnya	46
Gambar 3.9	Perbandingan Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat dalam Satu Cluster	47
Gambar 3.10	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara.....	48

Gambar 3.11 Perbandingan Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat dengan Tahun Sebelumnya.....	49
Gambar 3.12 Perbandingan Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat dalam Satu Cluster	50
Gambar 3.13 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara.....	51
Gambar 3.14 Perbandingan Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat dengan Tahun Sebelumnya.....	52
Gambar 3.15 Perbandingan Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat dalam Satu Cluster	53
Gambar 3.16 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara.....	54
Gambar 3.17 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Tahun Sebelumnya.....	55
Gambar 3.18 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dalam Satu Cluster	56
Gambar 3.19 Perbandingan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dengan Tahun Sebelumnya.....	58
Gambar 3.20 Perbandingan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Satu Cluster	59
Gambar 3.21 Perbandingan Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan dalam Satu Cluster	62
Gambar 3.22 Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dengan Tahun Sebelumnya	66
Gambar 3.23 Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dalam Satu Cluster	66
Gambar 3.24 Perbandingan Sampel per Komoditi yang Diuji di Labororium BBPOM di Manado	74
Gambar 3.25 Perbandingan Peresentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar dengan Tahun Sebelumnya	74

Gambar 3.26 Perbandingan Nilai Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar dalam Satu Cluster	76
Gambar 3.27 Perbandingan Capaian Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan dengan Tahun Sebelumnya	77
Gambar 3.28 Perbandingan Capaian Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan dalam Satu Cluster	78
Gambar 3.29 Perbandingan Capaian Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan dengan Tahun Sebelumnya	81
Gambar 3.30 Perbandingan Capaian Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan dalam Satu Cluster	82
Gambar 3.31 Perbandingan Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan Tahun Sebelumnya	85
Gambar 3.32 Perbandingan Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dalam Satu Cluster	85
Gambar 3.33 Perbandingan Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Tahun Sebelumnya	88
Gambar 3.34 Perbandingan Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam Satu Cluster	88
Gambar 3.35 Penanganan Kasus serta Perkara Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.....	91
Gambar 3.36 Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.....	93
Gambar 3.37 Perbandingan Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan hingga Tahap II dalam Satu Cluster	95
Gambar 3.38 Nilai AKIP BBPOM di Manado Tahun 2017-2019.....	98
Gambar 3.39 Perbandingan Nilai AKIP dalam Satu Cluster.....	98
Gambar 3.40 Realisasi Anggaran berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2017 - 2019.....	98
Gambar 3.41 Capaian Kinerja BBPOM di Manado Berdasarkan Aplikasi SMART DJA Tahun 2019.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 1.2	Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Sulawesi Utara	15
Tabel 1.3	Daftar Kab/Kota yang Telah Melaksanakan MoU dan Pembentukan Tim Terpadu	17
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2015 – 2017 (OTK Lama)	25
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Manado 2018 – 2019	27
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Manado	31
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kegiatan BBPOM di Manado Tahun 2019 dan 2018.....	31
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai dalam Satu Cluster	32
Tabel 3.4	Target dan Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Manado Tahun 2019	34
Tabel 3.5	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado Tahun 2019.....	38
Tabel 3.6	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara.....	41
Tabel 3.7	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara.....	44
Tabel 3.8	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara.....	47

Tabel 3.9	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara.....	50
Tabel 3.10	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara.....	53
Tabel 3.11	Indeks Kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado.....	57
Tabel 3.12	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	61
Tabel 3.13	Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	64
Tabel 3.14	Perbandingan dan Jumlah Jenis Layanan Tahun 2017 - 2019	68
Tabel 3.15	Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Sulawesi Utara	73
Tabel 3.16	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	76
Tabel 3.17	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	80
Tabel 3.18	Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado.....	84
Tabel 3.19	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi Sulawesi Utara	87
Tabel 3.20	Persentase Perkara yang Diselesaikan hingga Tahap II di Wilayah Kerja BBPOM di Manado	87
Tabel 3.21	Nilai AKIP BBPOM di Manado.....	96
Tabel 3.22	Kategori Penilaian SAKIP	97
Tabel 3.23	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Nilai SAKIP	100

Tabel 3.24	Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan BBPOM di Manado Tahun 2019	105
Tabel 3.25	Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan BBPOM di Manado Tahun 2019	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BBPOM di Manado	117
Lampiran 2	Rencana Kinerja Tahun 2019 BBPOM di Manado.....	120
Lampiran 3	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 BBPOM di Manado	121
Lampiran 4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BBPOM di Manado.....	122
Lampiran 5	Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019 BBPOM di Manado	124
Lampiran 6	Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Tahun 2019 BBPOM di Manado.....	125
Lampiran 7	Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Manado terhadap BBPOM yang Setara/sejenis	126

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Institusi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, BBPOM di Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan BBPOM di Manado berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis, merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan Badan POM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. BBPOM di Manado dikategorikan sebagai Balai Besar POM.

Selain mengatur tentang kategori Balai dan struktur organisasi, juga dibentuk Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun total *catchment area* Balai Besar POM terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, dengan rincian 12 kabupaten/kota merupakan *catchment area* BBPOM di Manado, sedangkan 3 kabupaten/kota merupakan *catchment area* Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun kabupaten/ kota dengan masing-masing *catchment area* adalah sebagai berikut :

1. BBPOM di Manado, cakupan pengawasan meliputi 12 kabupaten/kota, yaitu Kota Manado, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten

Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, cakupan pengawasan meliputi 3 kabupaten, meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tugas Pokok

BBPOM di Manado melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

BBPOM di Manado memiliki beberapa fungsi, adapun fungsi tersebut, yaitu

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sedangkan secara khusus Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

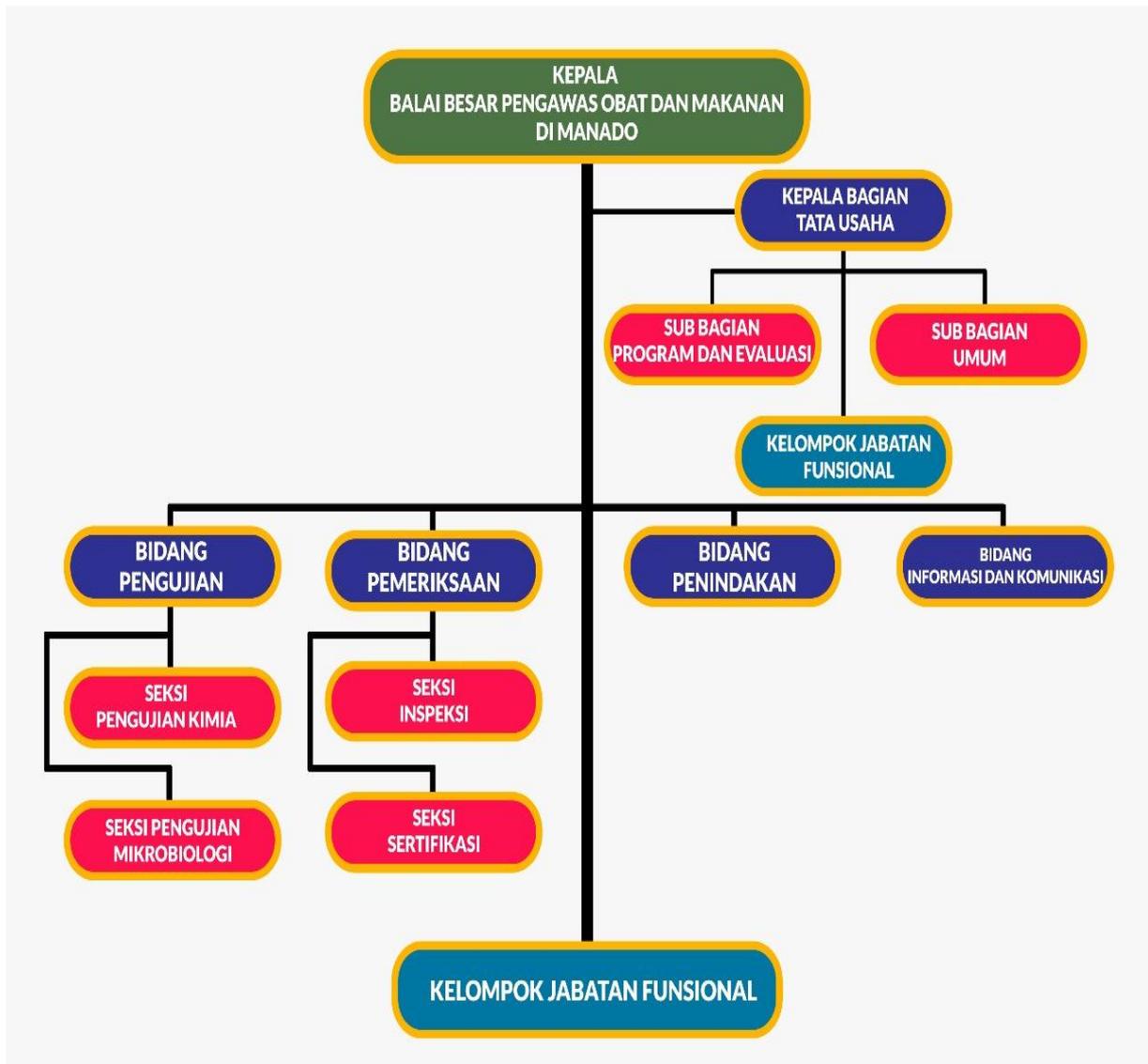
- a. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- b. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
- c. Pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
- d. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
- e. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap penyelenggaraan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- f. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT Badan POM dikoordinasikan oleh BBPOM di Manado guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan tata kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Wilayah kerja BBPOM di Manado telah mengalami perubahan, dengan berdirinya Balai POM di Sofifi pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. 14 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Laksana UPT di Lingkungan Badan POM RI. Wilayah kerja BBPOM di Manado hingga tahun 2014 meliputi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, dengan berdirinya Balai POM di Sofifi, maka ada pembagian wilayah kerja yaitu BBPOM di Manado untuk Wilayah Sulawesi Utara dan Balai POM Sofifi untuk Wilayah Maluku Utara. Dengan berdirinya Balai POM di Sofifi, maka akan berpengaruh terhadap perencanaan dan program pengawasan BBPOM di Manado. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Lampiran II.1 - II.3 dimulai pada tahun 2016 BBPOM di Manado dan Balai POM di Sofifi memiliki program masing- masing yang dituangkan dalam RENSTRA. Pada Tahun 2018, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam wilayah kerja BBPOM di Manado terdapat Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kepulauan Sangihe dengan cakupan wilayah adalah Kabupaten Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Struktur organisasi BBPOM di Manado dan Loka Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Manado



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Tugas pokok dan fungsi BBPOM di Manado diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian menyelenggarakan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan
 - b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia;
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

2. Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan
 - b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
 - c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan
 - d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi;
- b. Seksi Sertifikasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

3. Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - d. Bidang Penindakan terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
4. Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan

- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - e. Bidang Informasi dan Komunikasi terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
 - d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana
 - e. Pelaksanan urusan kepegawaian
 - f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub bagian Program dan Evaluasi
- b. Sub bagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan,

penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Program*.

BBPOM di Manado sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2015-2019, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market di seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara meliputi sertifikasi sarana produksi dan sarana distribusi obat, pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

BBPOM di Manado sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Utara;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

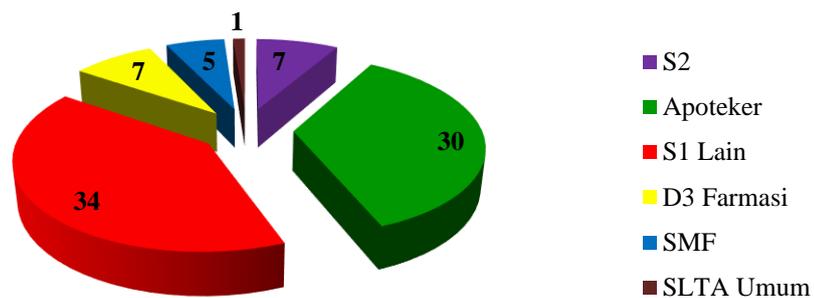
Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Manado dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

a. Internal

➤ Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai BBPOM di Manado sebanyak 84 orang terdiri dari 67 orang penempatan BBPOM di Manado, sebanyak 17 orang Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada Gambar 1.3



Gambar 1.3 Jumlah SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rincian Distribusi Pegawai berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

UPT	Tingkat Pendidikan							Total
	S3	S2	Apt	S1 Lain	D3 Farm	SMF	SLTA Umum	
BBPOM di Manado								
Kepala		1						1
Bagian TU		1		10	3	1	1	16
Bidang Pengujian		2	15	5	3			25
Bidang Pemeriksaan		1	6	2		3		12
Bidang Penindakan		1	3	4				8
Bidang Informasi dan Komunikasi		1	2	2				5

Loka POM di Kab.Kep.Sangihe								
Kepala Loka			1					1
Staff Loka		4	10	1	1			16
TOTAL	7	30	34	7	5	1		84

➤ **Sumber Daya Lainnya**

- Kantor BBPOM di Manado memiliki 2 (dua) bangunan Gedung yaitu Gedung Toar luas bangunan 3840 m² dan Gedung Lumimuut luas bangunan 2000 m², total luas bangunan sebesar 5840 m², kemudian didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. BBPOM di Manado memiliki laboratorium pengujian kimia, dan laboratorium pengujian mikrobiologi. Selain itu BBPOM di Manado dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya serta laboratorium BBPOM di Manado telah terakreditasi ISO/IEC 17025 : 2017.
- Kantor Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan tanah seluas 800 m² merupakan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Nomor : 028/23/2190 dan Nomor : B-PL.03.07.112.8.`9.3690 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah dan saat ini sedang berproses dalam penerbitan sertifikat.

➤ **Anggaran**

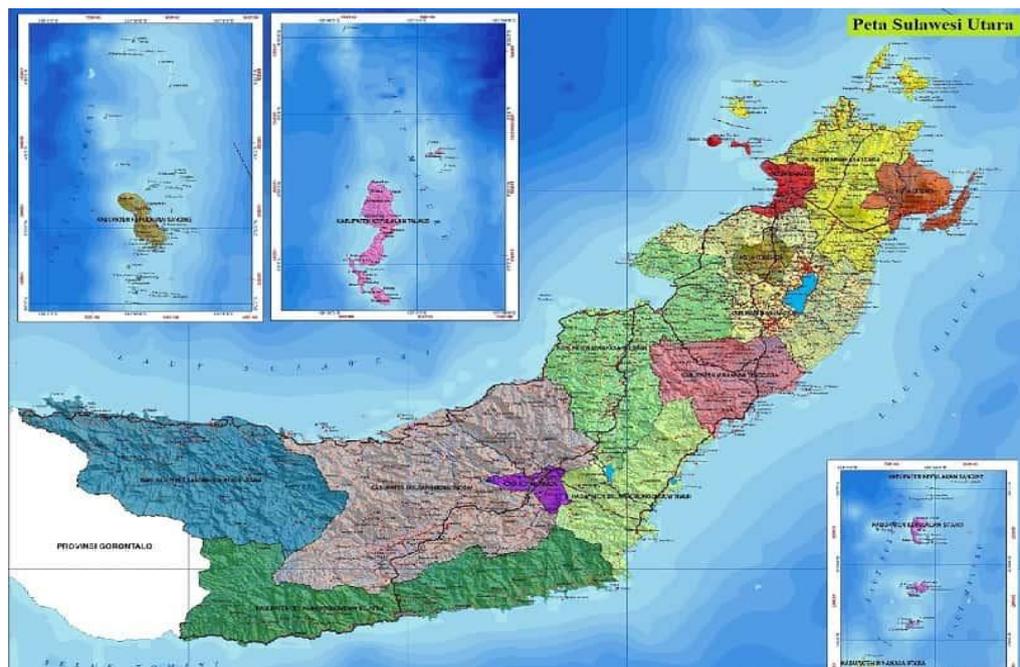
Anggaran BBPOM di Manado termasuk Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 39.801.690.000,00 bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2019 Nomor : DIPA-063.01.2.432901/2019 yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2018, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 BBPOM di Manado

mendapatkan tambahan anggaran untuk keperluan Diklat Dasar CPNS TA 2019 oleh Direktorat Jendral Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 39.049.251.000,00, kemudian pada tanggal 13 September 2019 BBPOM di Manado kembali mendapatkan tambahan anggaran untuk Revisi Belanja Pegawai sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 39.801.690.000,00

b. Eksternal

➤ Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Sulawesi Utara terletak pada $123^{\circ} 07'$ hingga $127^{\circ} 10'$ Bujur Timur dan $00^{\circ} 15'$ hingga $05^{\circ} 34'$ Lintang Utara. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara seluas 15.069 km^2 . Cakupan wilayah kerja BBPOM di Manado terdiri dari 15 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 2.494.100 jiwa, dengan proporsi jumlah penduduk perempuan 1.223.400 jiwa (49 %) dan penduduk laki laki sejumlah 1.270.700 jiwa (51 %).



Gambar 1.4 Wilayah Kerja BBPOM di Manado dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe

➤ **Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi**

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara meliputi industri kecil obat tradisional, industri pangan MD serta industri rumah tangga pangan. Untuk sarana distribusi meliputi sarana distribusi obat yaitu Pedagang Besar Farmasi serta instalasi farmasi Kabupaten / Kota, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Selain sarana distribusi obat, juga terdapat sarana pelayanan kefarmasian meliputi Apotek, Toko Obat, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi

NO.	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA
1.	Industri Farmasi	0
2.	Jumlah Industri Obat Tradisional	0
3.	Industri Kecil Obat Tradisional	3
4.	Industri Kosmetika	0
5.	Industri PKRT	0
6.	Industri Pangan (MD)	42
7.	Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT)	821
8.	Industri Minuman Keras	9
9.	Pedagang Besar Farmasi	35
10.	Apotek	212
11.	Toko Obat berizin	103
12.	Distributor Obat Tradisional	104
13.	Distributor Kosmetika	137
14.	Distributor Pangan	1924
15.	Distributor PKO	68
16.	Distributor PKRT	0
17.	Distributor Bahan Berbahaya	10
18.	Rumah Sakit	38
19.	Puskesmas	140
20.	Balai Pengobatan/Klinik	6
21.	Instalasi Farmasi Kabupaten Kota	16
TOTAL		3.763

1.5. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Manado antara lain:

➤ Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

➤ Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri generasi keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Revolusi industri keempat, menjadi lompatan besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Untuk itu, sektor industri nasional perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing di era Industry 4.0 karena system siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain dengan manusia secara bersamaan. Kemajuan di bidang industri harus diimbangi dengan pengembangan SDM tenaga pengawas untuk lebih memahami bahwa ketersediaan data tidak hanya hitam di atas putih dalam bentuk dokumen, namun bisa dalam bentuk *data base* dengan sistem *paperless*.

- Implementasi Inpres 3/2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh BBPOM di Manado sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Berikut Tabel Kabupaten/Kota yang sudah dilaksanakan MoU dan pembentukan Tim Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3 Daftar Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang Telah Melaksanakan MoU dan Pembentukan Tim Terpadu

No	Kab/ Kota	Yang telah memiliki		
		Instruksi Gubernur/ Bupati/Walkota	MoU	SK Tim Koordinasi
1	Provinsi Sulawesi Utara	√	√	-
2	Kota Manado	√	√	√
3	Kab Minahasa Utara	√	√	-
4	Kab Bitung	√	√	√
5	Kota Tomohon	√	√	√
6	Kab Minahasa Selatan	√	√	√
7	Kab Minahasa	√	Penjadwalan ttd	On proses
8	Kab Minahasa Tenggara	√	√	-
9	Kab Bolaang Mongondow Timur	-	On proses	On proses
10	Kab Bolaang Mongondow Selatan	√	√	√
11	Kab Bolaang Mongondow	-	On proses	On proses
12	Kota Kotamobagu	√	√	-
13	Kab Bolaang Mongondow Utara	√	√	√
14	Kab Kepulauan Sangihe	√	√	-
15	Kab Kepulauan Talaud	√	√	-
16	Kab Kepulauan Sitaro	√	On proses	On proses
TOTAL		14	12	6

➤ Trend Penyebaran Informasi dan Transaksi Perdagangan melalui Media Sosial dan *Online*

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti kader PKK, kader karang taruna, komunitas sekolah, pelaku usaha (ritel), dan pedagang kreatif lapangan (PKL). Hingga tahun 2019 BBPOM di Manado baru dapat mengintervensi 25 desa dari 1.839 desa/kelurahan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan dan mereplikasi Desa Pangan Aman di seluruh desa yang ada. Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih dan menggunakan produk sehingga menjadi konsumen yang cerdas sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan

kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas BBPOM di Manado sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

- **Kemandirian Pelaku Usaha untuk Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)** mempunyai potensi sangat besar untuk kemajuan perekonomian Indonesia, karena tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Mensejahterahkan UMKM akan berdampak besar bagi perekonomian negara Indonesia. Peran UMKM dalam perkembangan perekonomian suatu negara ini terbukti dengan berkurangnya pengangguran dan penciptaan usaha baru yang terus bermunculan. Dengan dibukanya MEA telah membuka kesempatan bagi UMKM untuk memasuki pasar baru. Namun UMKM Indonesia harus memperbaiki mutu produk untuk mampu bersaing di pasar ASEAN dan lebih luas lagi di pasar dunia. UMKM juga harus membuat persiapan yang matang dan membutuhkan strategi yang akan membuat UMKM di Indonesia tersebut bisa berdaya saing dan berani merebut pasar dengan aktif berpromosi dan melihat potensi diri. Sebagai salah satu wujud dari misi kedua yaitu mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan, Badan POM menggandeng Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memiliki produk yang aman dan mampu berdaya saing. Beberapa kegiatan berupa pendampingan dan bimbingan teknis telah dilakukan terhadap beberapa UMKM yang dianggap layak untuk “naik kelas” dari nomor P-IRT (Dinkes Kab/Kota) menjadi nomor MD dari Badan POM, serta bimbingan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB). Kerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi dengan pendampingan “ Start Up” atau tenan serta proaktif bekerjasama dengan sarana produksi yang dibina oleh Lembaga-lembaga penyantun (Instansi Pemerintah, Perbankan, dan LSM)
- **Daerah Tujuan Wisata**

Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki percampuran budaya penduduk asli dan pendatang menghasilkan asimilasi budaya yang unik dan dengan memperhatikan aspek geografis yang memberikan keindahan alam sebagai hasil perpaduan keindahan alam laut dan pegunungan. Ketersediaan penerbangan langsung dari beberapa kota di luar Indonesia menjadikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu destinasi wisata favorit turis China. Peningkatan jumlah wisatawan China dari Changsa Huanghua, Tianjin, Guangzhou Baiyun, Shanghai Pudong, dan Xi'an Xianyang 400% dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi tersebut mendorong BBPOM di Manado untuk mendukung program pemerintah daerah untuk memperkenalkan kuliner khas daerah dengan meningkatkan kualitas dan keamanan pangan siap saji dan industri pangan rumah tangga berupa stikerisasi / labelisasi "Pang Barasa" (Pangan Bebas Bahan Berbahaya dan Sehat) pada rumah makan, restoran diseluruh daerah destinasi wisata di 6 kabupaten/Kota (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur).

➤ Terwujudnya Masyarakat Ekonomi Asia

Dampak dari Revolusi Industri 4.0 adalah era globalisasi yang sudah tidak mungkin dihindari saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan internet yang kian meluas, membawa dampak nyata terbukanya ruang dan kesempatan baru dalam transaksi perdagangan antar negara. Era teknologi yang tanpa batas menyebabkan aliran barang antar negara mudah terinformasikan dan mudah diperoleh. Untuk melindungi produknya, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Asean Economi Community telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke 27 tahun 2015 di Malaysia, dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, yang berdampak pada tingginya

ekspor dan impor produk-produk antar negara ASEAN. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negaranegara lain di seluruh Asia Tenggara. Aturan antar negara ASEAN yang semakin longgar menyebabkan banyak produk-produk impor masuk ke Indonesia secara illegal. Indonesia adalah pasar terbesar produk obat dan makanan karena memiliki sekitar 250 juta penduduk yang merupakan 45% dari total penduduk ASEAN. Penjualan on line ataupun barang *tentengan* yang tadinya untuk keperluan sendiri beralih fungsi diperjualbelikan secara komersial. Di sisi lain tujuan MEA untuk melindungi produk ASEAN ternyata bisa menjadi bumerang dengan meningkatnya produk illegal karena semakin longgarnya peraturan antar Negara ASEAN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Perencanaan kinerja BBPOM di Manado tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis BBPOM di Manado tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam SK Kepala BBPOM di Manado Nomor HK.04.970.05.2015.2701 tanggal 6 Mei tahun 2015, serta revisi renstra pada tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala BBPOM di Manado Nomor HK.06.02.112.09.18.5035 tanggal 7 September tahun 2018 . Pada dokumen Renstra maupun revisi renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Manado.

Revisi Renstra BBPOM di Manado 2015-2109 ditetapkan pada tanggal 07 September 2018 karena adanya perubahan SOTK baru di lingkungan Badan POM, merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang :

- (1) terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau
- (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

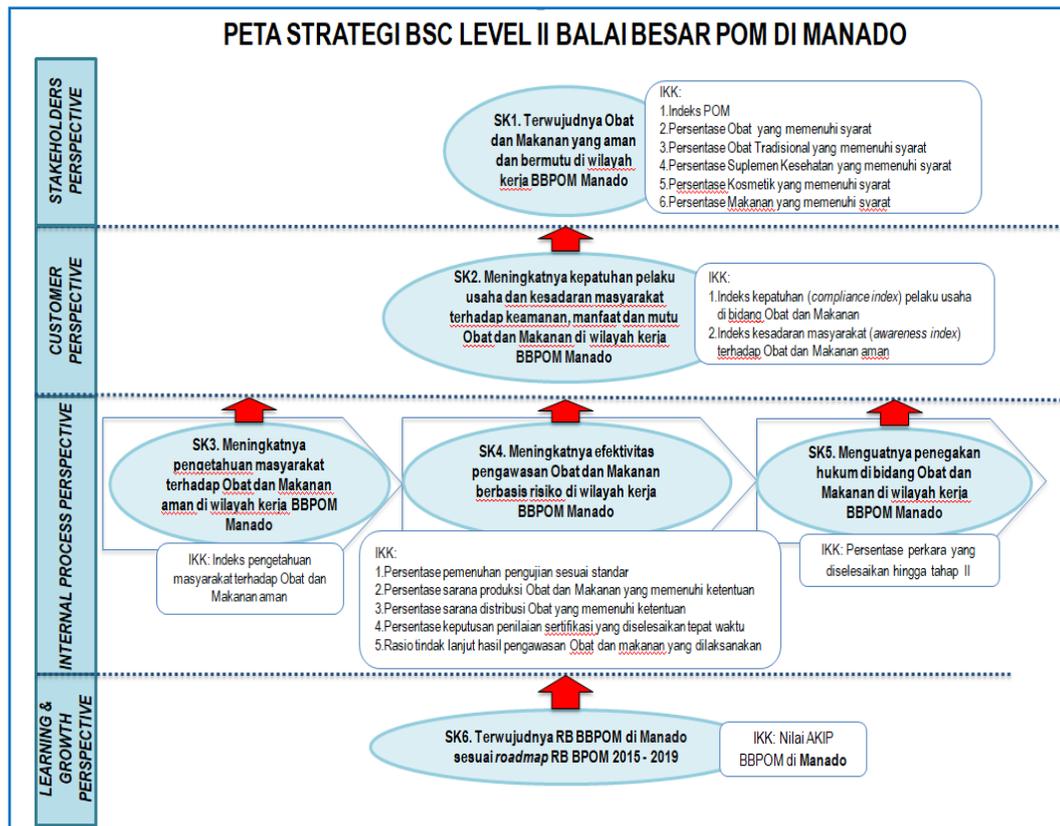
Pada Revisi Renstra BBPOM di Manado juga terjadi perubahan pendekatan manajemen kinerja, yang semula berdasarkan *Logical Framework* berubah menggunakan pendekatan *Balanced Score Card*. *Balanced Score card* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, sehingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi

pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengkaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan, yaitu, mengkaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2015-2019 dapat dilihat pada peta strategi level II BBPOM di Manado, sebagai berikut :



Gambar 2.1 Peta Strategi Level II BBPOM di Manado

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBPOM di Manado dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Manado Tahun 2018 menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator pada tahun 2018 dan 16 (enam belas) indikator pada tahun 2019 yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja BBPOM di Manado digambarkan dalam tabel 2.1 dan table 2.2 di bawah ini.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BBPOM di Manado) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM RI).

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2018 (OTK Lama)

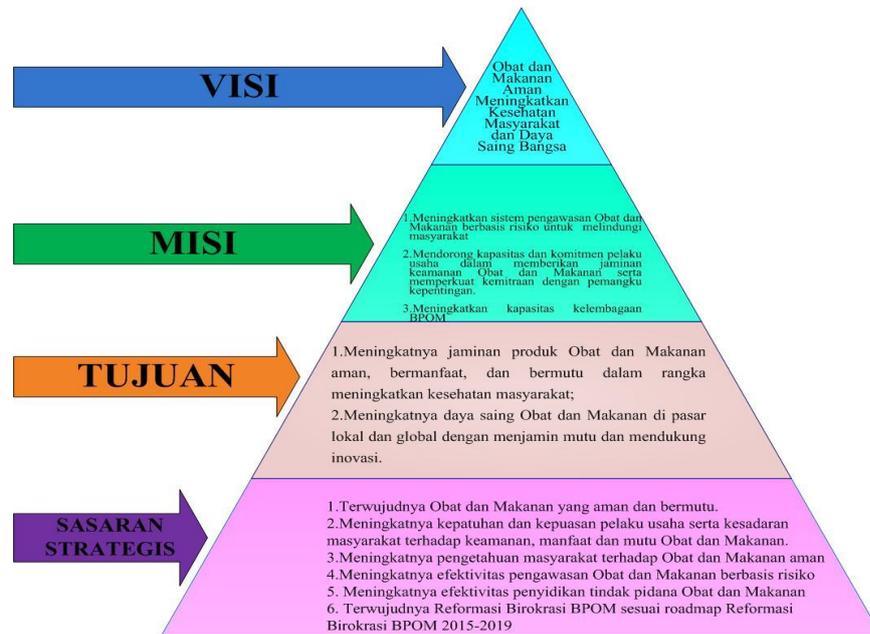
Sasaran Staregi	Indikator	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat ^{*)}	92,00	92,50	93,00	95,00
	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat ^{*)}	80,00	81,00	82,00	90,00
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat ^{*)}	89,00	90,00	91,00	95,00
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat ^{*)}	89,00	90,00	91,00	95,00
	Persentase makanan yang memenuhi syarat ^{*)}	88,10	88,60	89,10	90,10
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat ^{*)}	70,00	71,00	72,00	76,00
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3	6 ^{k)}	9 ^{k)}	12 ^{k)}
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	B	B	B	B

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BBPOM di Manado 2018-2019

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	70	71
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	95%	94%
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	90%	60%
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	95%	80%
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	95%	87%
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	90,10 %	71%
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	60	61
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	-	66
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	60	61

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Utara	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Utara	100%	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	45%	50%
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	50%	50%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Utara	85%	90%
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado	36,10	46,95
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Manado	40%	50%
Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Manado	78	81

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2015-2019) diharapkan BBPOM di Manado mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya karena komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Manado tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam

upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019.

Kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator :

- a. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir tahun 2019.
- b. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 60% pada akhir tahun 2019.
- c. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 80% pada akhir tahun 2019.
- d. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 87% pada akhir tahun 2019.
- e. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 71% pada akhir tahun 2019.
- f. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2019.
- g. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 50% pada akhir tahun 2019.
- h. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 50% pada akhir tahun 2019.
- i. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 90% pada akhir tahun 2019.
- j. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM, dengan target 46,95 pada akhir tahun 2019.
- k. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II, dengan target 50% pada akhir tahun 2019.
- l. Nilai AKIP Balai, dengan target 81 pada akhir tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan BBPOM di Manado dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja BBPOM di Manado dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam gambar 3.1



Gambar 3.1 Kategori capaian kinerja

Pada tahun 2019 BBPOM di Manado telah berhasil mencapai 6 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan seperti pada tabel dibawah ini. Pada tahun 2019, dari 6 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, 2 sasaran kegiatan dengan capaian diatas 120 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini di sebabkan penetapan target yang belum tepat yaitu terlalu rendah karena indikator kinerja pendukung pada kedua sasaran kegiatan tersebut merupakan indikator baru ditahun 2018, sehingga baseline data yang digunakan untuk penetapan target di Tahun 2019 hanya menggunakan data capaian 1 tahun sebelumnya yang belum bisa dijadikan sebagai acuan. Capaian sasaran kegiatan Tahun2019 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Manado Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Tahun 2019	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara	112,78	Sangat Baik
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	125,85	Tidak Dapat Disimpulkan
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	128,31	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Utara	113,21	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB/BPOM di Manado	105,88	Baik
6	Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	92,10	Baik

Perbandingan Capaian sasaran kegiatan Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2

*Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kegiatan BBPOM di Manado
Tahun 2019 dan 2018*

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian 2019	% Capaian 2018
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara	112,78	104,77
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	125,85	124,92
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	128,31	111,10
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Utara	113,21	129,95
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB/BPOM di Manado	105,88	134,62
6	Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	92,10	93,76

Capaian sasaran kegiatan jika dibandingkan dengan 3 balai dalam satu *cluster* dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai dalam Satu Cluster

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian BBPOM Manado	% Capaian BBPOM Padang	% Capaian BBPOM Jakarta	% Capaian BBPOM Lampung
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara	112.78	106.55	112.78	104.20
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	125.85	116.71	122,29	101.50
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	128.31	115.54	124.16	125.31
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Utara	113.21	105.56	111.04	95.48
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	105.88	123.08	127.28	127.28
6	Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	92.10	94.51	95.20	91.93

Berdasarkan tabel 3.3, pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Manado dibandingkan dengan ketiga balai lain dalam satu *cluster* sangat bervariasi. Pada sasaran strategis pertama dan keempat pencapaian BBPOM di Manado “Sangat Baik” yaitu diatas 110%, terdapat 2 sasaran kegiatan BBPOM di Manado yang capaiannya diatas 120 % sehingga masuk pada kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” hal ini disebabkan karena penentuan target yang tidak tepat yaitu terlalu rendah. Nilai capaian tersebut dapat dijadikan baseline dalam penentuan target pada periode penyusunan rencana strategis (renstra) berikutnya. Pencapaian sasaran strategis keenam yang diukur dengan indikator nilai AKIP pada BBPOM di Manado dan 3 balai lain dalam satu *cluster* adalah dibawah 100% tetapi masih masuk dalam kriteria “Baik”.

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada revisi Rencana Strategis BBPOM di Manado tahun 2015-2019 telah menetapkan 6 (enam) sasaran kegiatan. Dalam mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), akan tetapi 1 IKU yaitu indeks kesadaran masyarakat belum dilakukan pengukuran pada tahun 2018.

Tabel 3.4 Target dan Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Manado Tahun 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	71	72,31	101,85
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	94%	86,07 %	91,56
		Persentase Obat Tradisional yang	60%	92,38 %	153,97

		Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara			
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	80%	83,52 %	104,4
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	87%	92,86 %	106,73
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	71%	83,91 %	118,18
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	61	89,44	146,62
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	66	69,35	105,08
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja	61	78,27	128,31

	BBPOM di Manado	wilayah kerja BBPOM di Manado			
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Utara	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Utara	100%	96,90 %	95,05
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	50%	68,87 %	137,74
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	50%	55,31 %	110,63
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Utara	90%	88,37 %	98,19
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado	46,95	58,43 %	124,45
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di	50%	52,94%	105,88

	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	wilayah kerja BBPOM di Manado			
6	Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM	81	74,60	92,10

Dari 16 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 5 indikator kinerja capaiannya melebihi 120% sehingga kategorinya tidak dapat disimpulkan, 9 indikator kinerja dengan kategori baik, serta 2 indikator kinerja dengan kategori sangat baik, yaitu indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di provinsi sulawesi utara dan persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado.

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara

A.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Sulawesi Utara

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado serta persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Utara.

A.1.1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

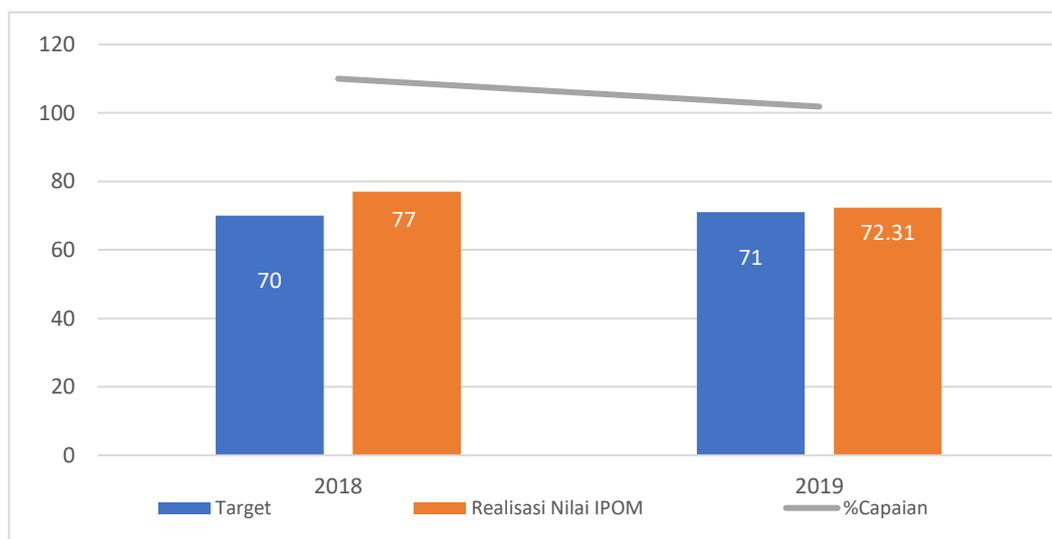
Tabel 3.5 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) di Wilayah Kerja BBPOM di Manado	71%	72,31%	101,85	Baik

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks POM dapat diilustrasikan melalui peta/spasial untuk menggambarkan secara sederhana IPOM di setiap provinsi/wilayah. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks, yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan. Variabel perhitungan IPOM didasarkan oleh beberapa variabel indikator yaitu indeks kepatuhan pelaku usaha, indeks kepuasan masyarakat, serta indikator kinerja masing – masing komoditi. Indikator kinerja mencakup jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis, presentase sampel yang memenuhi syarat, persentase cakupan sarana produksi dan distribusi yang diawasi serta persentase sarana produksi dan distribusi yang memenuhi ketentuan.

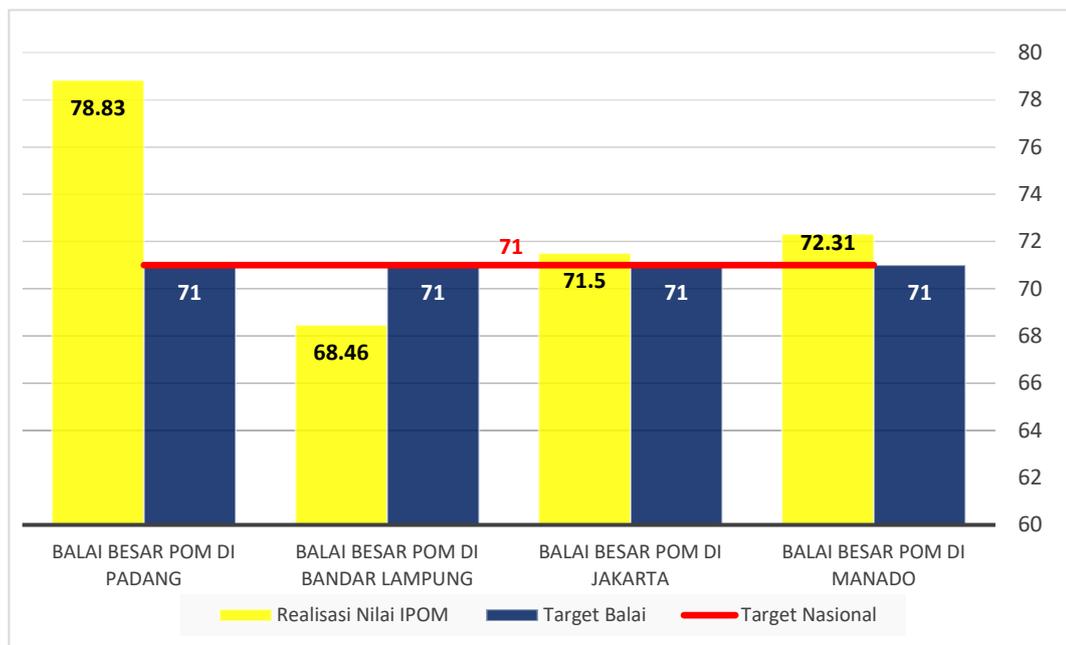
Nilai indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado adalah 72,31. Nilai tersebut lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 71, sehingga % capaian kinerja pada indikator ini adalah 101,85 dengan kategori “Baik”. Nilai tersebut juga berada diatas rata – rata nasional yaitu 70,95.

Jika dibandingkan dengan nilai IPOM tahun sebelumnya, terjadi kenaikan target dari 70 menjadi 71. Namun demikian terjadi penurunan nilai IPOM rata-rata nasional dari tahun 2018 yaitu 77 menjadi 72,31 seperti terlihat pada gambar 3.2. Berdasarkan tren nilai tersebut, perlu ditingkatkan nilai dari variabel – variabel pendukungnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan indeks kepatuhan pelaku usaha dengan pemberian bimtek maupun helpdesk kepada pelaku usaha dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat melalui peningkatan layanan publik serta peningkatan kinerja pengawasan dengan peningkatan cakupan pengawasan.



Gambar 3.2 Perbandingan Nilai IPOM dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan Balai lain dalam satu *cluster*, nilai IPOM BBPOM di Manado lebih rendah dari BBPOM di Padang yang mendapatkan nilai IPOM tertinggi diantara semua Balai, namun lebih tinggi dari BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Bandar Lampung sebagaimana terlihat pada gambar 3.3. Nilai capaian IPOM pada satu *cluster* tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori Baik untuk 3 Balai, dan kategori sangat baik untuk capaian nilai BBPOM di Padang.



Gambar 3.3 Perbandingan Nilai IPOM dalam Satu Cluster

Dalam upaya peningkatan nilai IPOM, BBPOM Manado telah melakukan beberapa hal antara lain :

- Help Desk CAPA dan Pendaftaran Sertifikasi CDOB PBF;
- Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis e-registration pendaftaran pangan olahan;
- Pendampingan UMKM;
- Sosialisasi peraturan PIRT/Pangan Olahan bagi inkubatorBisnis Teknologi (IBT) Universitas SamRatulangi;
- Bimtek terkait dengan CDOB yang melibatkan pelaku usaha dan Penanggung Jawab PBf dan IFK.

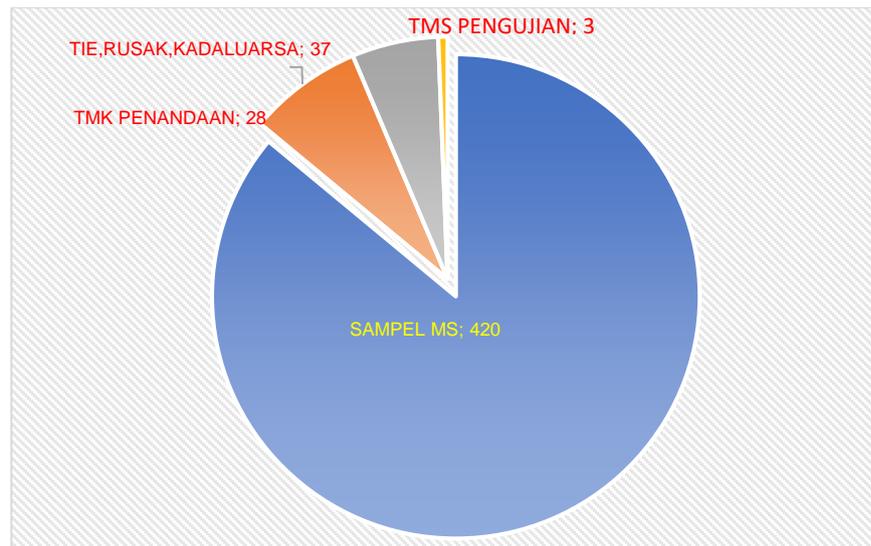
A.1.2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 3.6 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	94%	86,07%	91,56	Baik

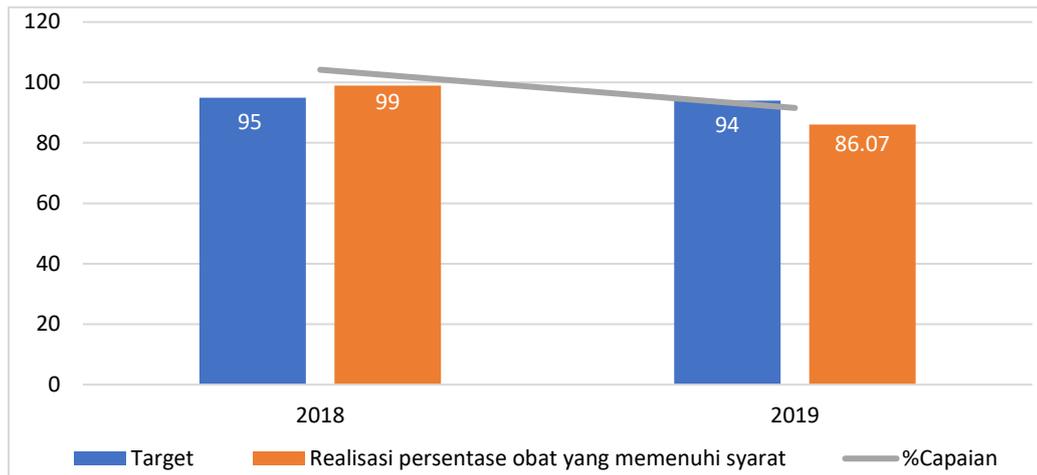
Perhitungan persentase obat yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria bahwa obat yang tidak memenuhi syarat meliputi obat yang tidak memiliki nomor ijin edar, obat kadaluarsa/rusak, obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian. Nilai persentase obat yang memenuhi syarat sama dengan 100% - persen obat yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut.

Nilai persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 adalah 86,07% dengan capaian kinerja 91,56% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria baik. Nilai tersebut mengindikasikan masih ada produk obat yang tidak memenuhi ketentuan dalam kategori tanpa ijin edar (TIE), kadaluarsa, rusak dan TMK penandaan serta TMS pengujian sebagaimana terlihat pada gambar 3.4. Produk obat yang TMS pengujian berjumlah 3 sampel dengan parameter uji yang TMS adalah disolusi pada sampel obat albendazole (1 sampel), captopril (2 sampel). Atas hasil tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bidang Pengujian dengan mengirimkan laporan hasil uji sampel tersebut kepada P3OMN dan unit teknis Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.



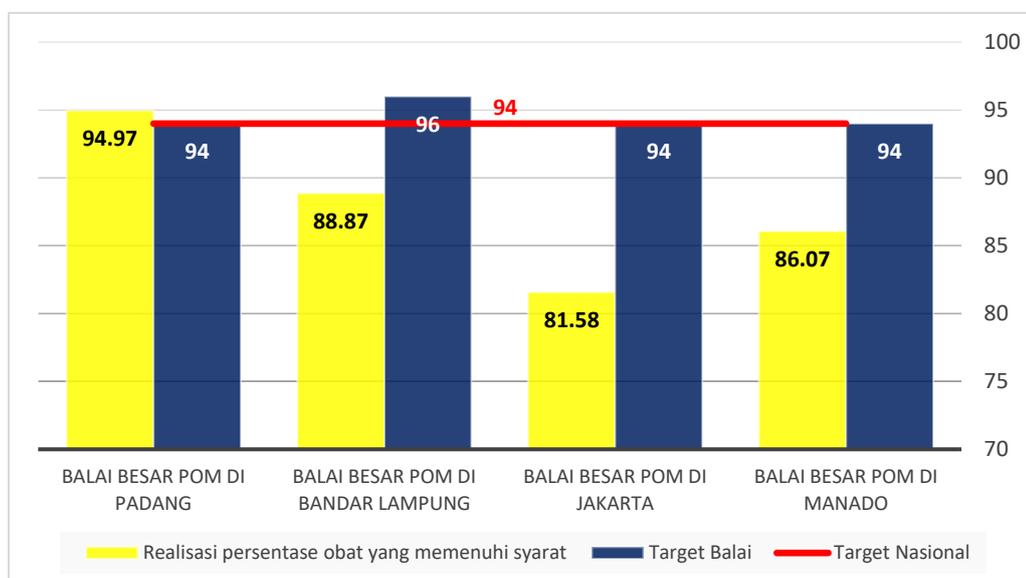
Gambar 3.4 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

Jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya pada indikator persentase obat yang memenuhi syarat, terjadi penurunan yaitu dari realisasi 99% dengan target 95% pada tahun 2018 menjadi realisasi 86,07% dengan target 94% pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada gambar 3.4. Penurunan nilai tersebut diakibatkan karena adanya perubahan metode perhitungan sampel MS yang mana pada tahun 2018 hanya memperhitungkan sampel MS pengujian, dan tidak ada sampel TIE ataupun rusak dan kadaluarsa yang disampling. Sedangkan pada tahun 2019, sampel TIE, rusak, dan kadaluarsa dihitung sebagai sampel TMS termasuk juga sampel TMK penandaan dan TMS peegujian. Perubahan itulah yang menyebabkan penurunan nilai persentase obat yang memenuhi syarat.



Gambar 3.5 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan nilai persentase obat yang memenuhi syarat antar balai dalam satu *cluster* dapat dilihat pada gambar 3.6. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa hampir semua balai tidak mencapai target yang telah ditetapkan kecuali BBPOM Padang yang nilai capaiannya paling tinggi dari empat balai dalam satu *cluster*. Persentase obat yang memenuhi syarat BBPOM Manado masih lebih rendah daripada BBPOM Padang dan Lampung, namun lebih tinggi dari BBPOM Jakarta.



Gambar 3.6 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dalam Satu Cluster

A.1.3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

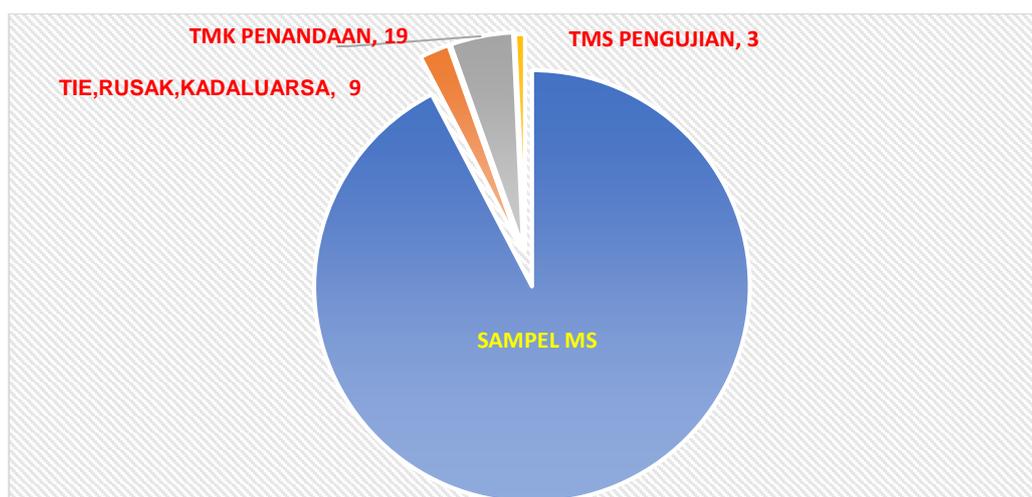
Tabel 3.7 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	60%	92,38%	153,97	Tidak dapat disimpulkan

Perhitungan persentase obat tradisional yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria bahwa obat tradisional yang tidak memenuhi syarat meliputi obat tradisional yang tidak memiliki nomor ijin edar, obat tradisional kadaluarsa/rusak, obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian. Nilai persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sama dengan 100% dikurangi persen obat tradisional yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut.

Nilai persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 adalah 92,38% dengan capaian kinerja 153,97% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Nilai tersebut mengindikasikan masih banyak produk obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan dalam kategori tanpa ijin edar (TIE), kadaluarsa rusak dan TMK penandaan serta TMS pengujian sebagaimana terlihat pada gambar 3.7. Produk obat tradisional yang TMS pengujian berjumlah 3 sampel dengan parameter uji yang TMS adalah kadar air, angka lempeng total serta angka lempeng total dan angka kapang khamir sedangkan 28 sampel tidak memenuhi ketentuan dalam kategori TMK Penandaan, TIE, rusak, kadaluarsa. Nilai capaian indikator presentase obat tradisional yang memenuhi syarat jauh melebihi target yang ditetapkan karena target tersebut mengikuti/mendekati target nasional

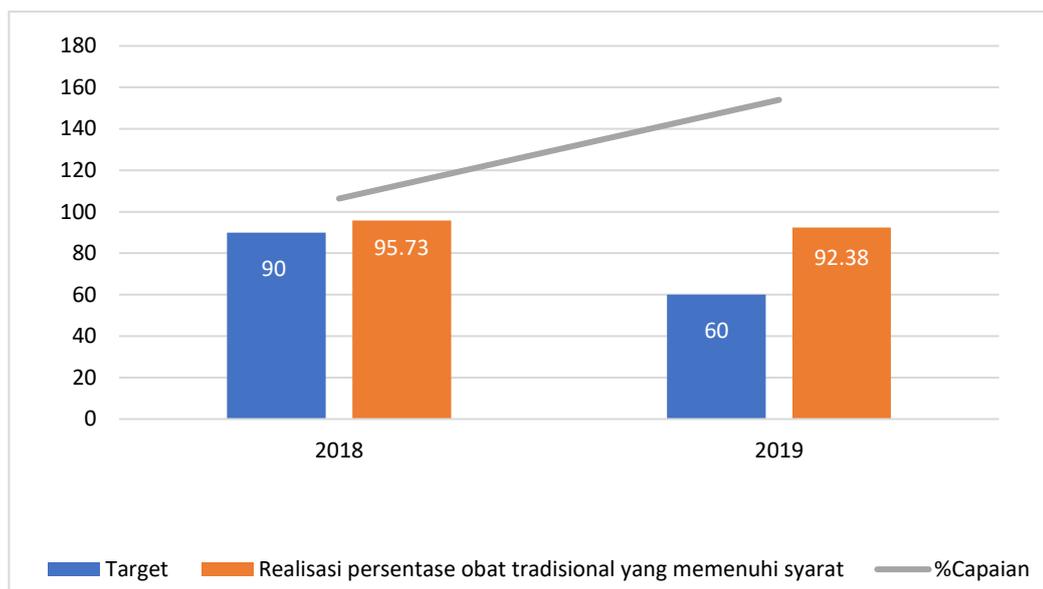
sementara kondisi peredaran dan penggunaan obat tradisional di Provinsi Sulawesi Utara berbeda dengan di Pulau Jawa. Peredaran dan penggunaan obat tradisional di Provinsi Sulawesi Utara tidak sebanyak di Pulau Jawa sehingga tidak banyak juga ditemukan produk obat tradisional yang TIE sebagaimana banyak ditemukan di daerah lain seperti di Pulau Jawa serta dikarenakan metode sampling acak sarana yang belum mengakomodir semua sarana yang menjual obat tradisional.



Gambar 3.7 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

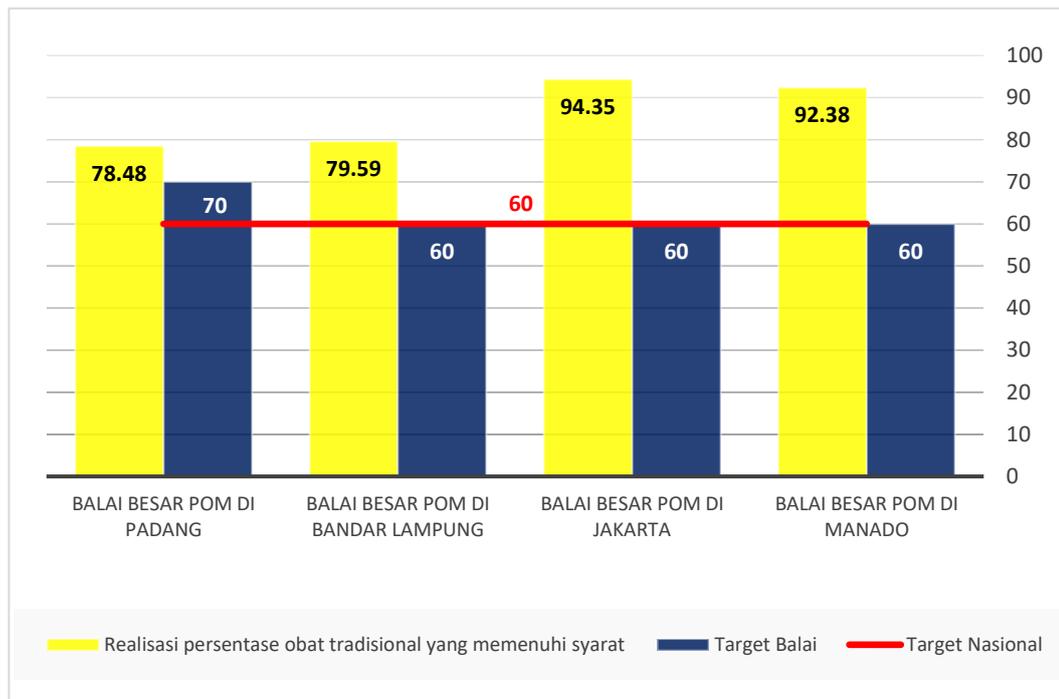
Jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya pada indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, terjadi penurunan yaitu dari realisasi 95,73% dengan target 90% pada tahun 2018 menjadi realisasi 92,38% dengan target 60% pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada gambar 3.8. Penurunan nilai tersebut diakibatkan karena adanya perubahan metode perhitungan sampel MS hanya memperhitungkan sampel MS pengujian, dan tidak ada sampel TIE ataupun rusak dan kadaluarsa yang disampling. Sedangkan pada tahun 2019, sampel TIE, rusak, dan kadaluarsa dihitung sebagai sampel TMS termasuk juga sampel TMK penandaan dan TMS peegujian. Perubahan itulah yang menyebabkan penurunan nilai persentase obat tradisional yang memenuhi syarat. Melihat

tren realisasi indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat jauh melebihi target, maka nilai tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan target pada periode penyusunan rencana strategis (Renstra) berikutnya. Meskipun secara nilai persentase obat tradisional yang memenuhi syarat ada penurunan, persen capaian kinerja indikator naik dari 106,37% menjadi 153,97% pada tahun 2019.



Gambar 3.8 Perbandingan Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan nilai persentase obat tradisional yang memenuhi syarat antar balai dalam satu *cluster* dapat dilihat pada gambar 3.9. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa semua balai telah melebihi target yang ditetapkan termasuk juga target nasional telah dilampaui. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat BBPOM Manado masih lebih rendah daripada BBPOM Jakarta yang mempunyai nilai persentase obat tradisional yang memenuhi syarat paling tinggi dibandingkan balai lain dalam satu *cluster*, namun lebih tinggi dari BBPOM Padang dan BBPOM Bandar Lampung.



Gambar 3.9 Perbandingan Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat dalam Satu Cluster

A.1.4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

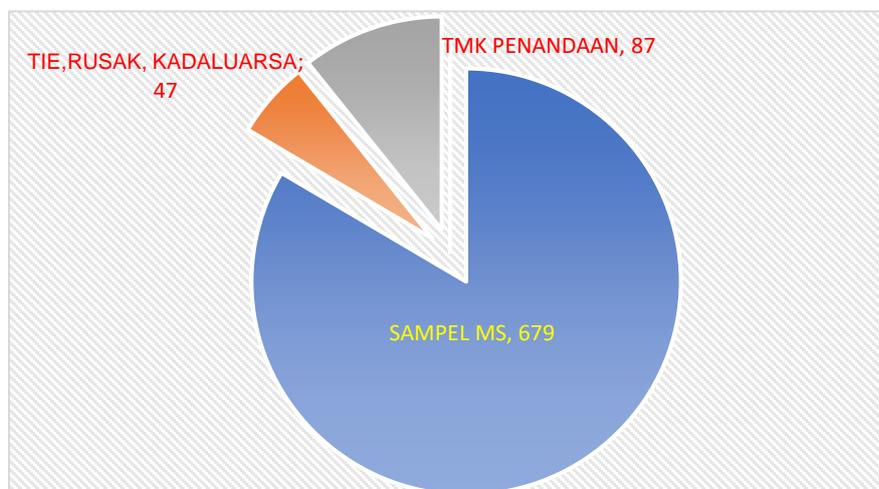
Tabel 3.8 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	80%	83,52%	104,4	Baik

Perhitungan persentase kosmetik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria bahwa kosmetik yang tidak memenuhi syarat meliputi kosmetik yang tidak memiliki nomor ijin edar, kosmetik kadaluarsa/rusak, kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian. Nilai persentase kosmetik yang memenuhi

syarat sama dengan 100% dikurangi persen kosmetik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut.

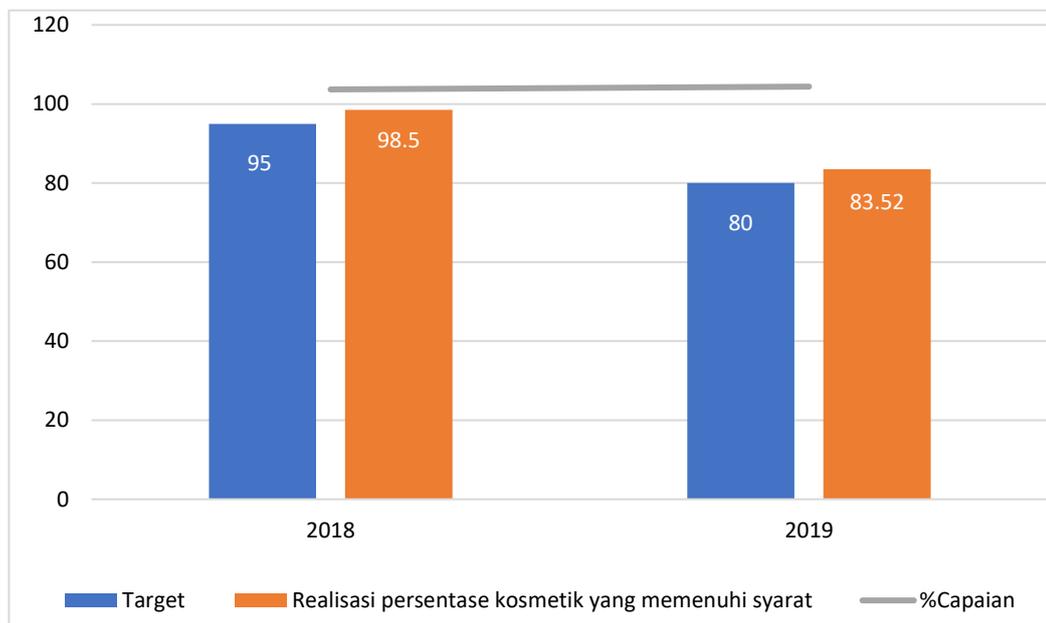
Nilai persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 adalah 83,52% dengan capaian kinerja 104,4% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Baik”. Nilai tersebut mengindikasikan masih ada produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 134 sampel dalam kategori tanpa ijin edar (TIE), kadaluarsa rusak dan TMK penandaan sebagaimana terlihat pada gambar 3.10. Nilai capaian indikator presentase kosmetik yang memenuhi syarat telah melebihi target yang ditetapkan.



Gambar 3.10 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

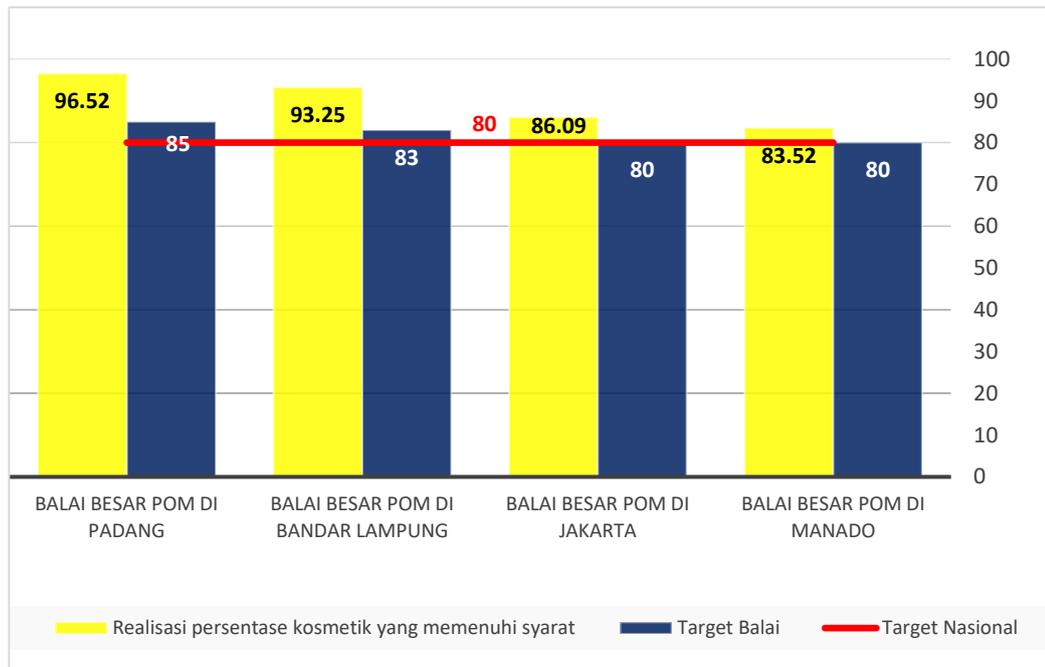
Jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya pada indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat, terjadi penurunan yaitu dari realisasi 98,5% dengan target 95% pada tahun 2018 menjadi realisasi 83,52% dengan target 80% pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada gambar 3.11. Penurunan nilai tersebut diakibatkan karena adanya perubahan metode perhitungan sampel MS hanya memperhitungkan sampel MS pengujian, dan tidak ada sampel TIE ataupun rusak dan kadaluarsa yang disampling. Sedangkan pada tahun 2019, sampel TIE, rusak, dan kadaluarsa dihitung sebagai sampel TMS termasuk juga sampel

TMK penandaan dan TMS peegujian. Perubahan itulah yang menyebabkan penurunan nilai persentase kosmetik yang memenuhi syarat. Meskipun secara persentase kosmetik yang memenuhi syarat mengalami penurunan, capaian kinerja indikator naik dari 103,68% menjadi 104,4% pada tahun 2019.



Gambar 3.11 Perbandingan Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan nilai persentase kosmetik yang memenuhi syarat antar balai dalam satu *cluster* dapat dilihat pada gambar 3.12. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa semua balai telah melebihi target yang ditetapkan termasuk juga target nasional telah dilampaui. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat BBPOM Manado paling rendah dibandingkan balai lain dalam satu *cluster*. Hal itu mengindikasikan banyaknya sampel kosmetik BBPOM Manado yang TIE, rusak maupun kadaluarsa dan TMK penandaan, karena tidak ada sampel kosmetik yang TMS pengujian.



Gambar 3.12 Perbandingan Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat dalam Satu Cluster

A.1.5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

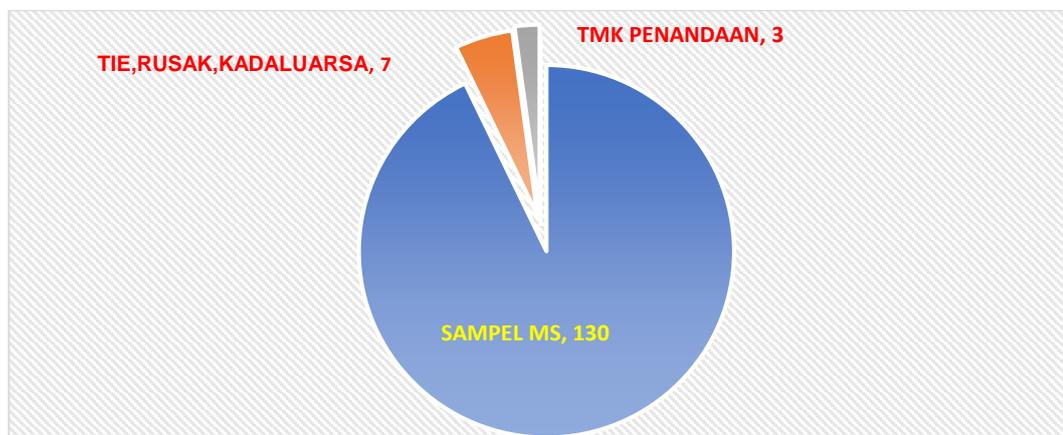
Tabel 3.9 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	87%	92,86%	106,73	Baik

Perhitungan persentase suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria bahwa suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat meliputi suplemen kesehatan yang tidak memiliki nomor izin edar, suplemen kesehatan kadaluarsa/rusak, suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian. Nilai persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sama dengan 100% dikurangi persen suplemen kesehatan yang

tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut.

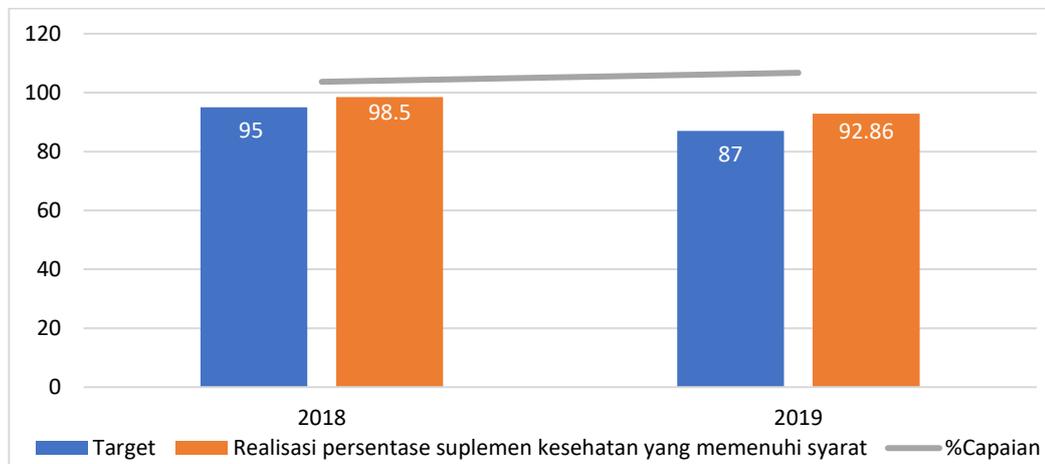
Nilai persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 adalah 92,86% dengan capaian kinerja 106,73% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Baik”. Nilai tersebut mengindikasikan masih ada produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan dalam kategori tanpa ijin edar (TIE), kadaluarsa rusak dan TMK penandaan sebagaimana terlihat pada gambar 3.13. Nilai capaian indikator presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat telah melebihi target yang ditetapkan.



Gambar 3.13 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

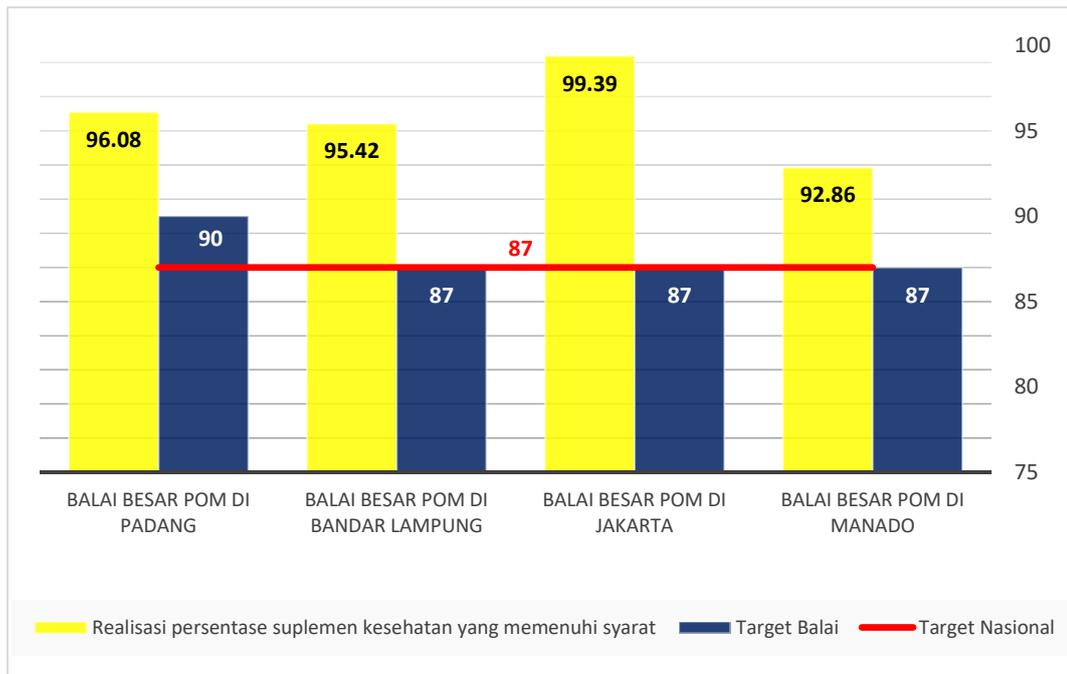
Jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya pada indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, terjadi penurunan yaitu dari realisasi 98,5% dengan target 95% pada tahun 2018 menjadi realisasi 92,86% dengan target 87% pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada gambar 3.14. Penurunan nilai tersebut diakibatkan karena adanya perubahan metode perhitungan sampel MS hanya memperhitungkan sampel MS pengujian, dan tidak ada sampel TIE ataupun rusak dan kadaluarsa yang disampling. Sedangkan pada tahun 2019, sampel TIE, rusak, dan kadaluarsa dihitung sebagai sampel TMS termasuk juga sampel TMK penandaan dan TMS peegujian. Perubahan itulah yang menyebabkan

penurunan nilai persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat. Meskipun secara persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat mengalami penurunan, capaian kinerja indikator naik dari 103,68% menjadi 106,74% pada tahun 2019.



Gambar 3.14 Perbandingan Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan nilai persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat antar balai dalam satu *cluster* dapat dilihat pada gambar 3.15. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa semua balai telah melebihi target yang ditetapkan termasuk juga target nasional telah dilampaui. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat BBPOM Manado paling rendah dibandingkan balai lain dalam satu *cluster*. Hal itu mengindikasikan masih banyak produk suplemen kesehatan yang beredar di Provinsi Sulawesi Utara yang TIE, rusak maupun kadaluarsa dan TMK penandaan, karena tidak ada sampel suplemen kesehatan yang TMS pengujian.



Gambar 3.15 Perbandingan Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat dalam Satu Cluster

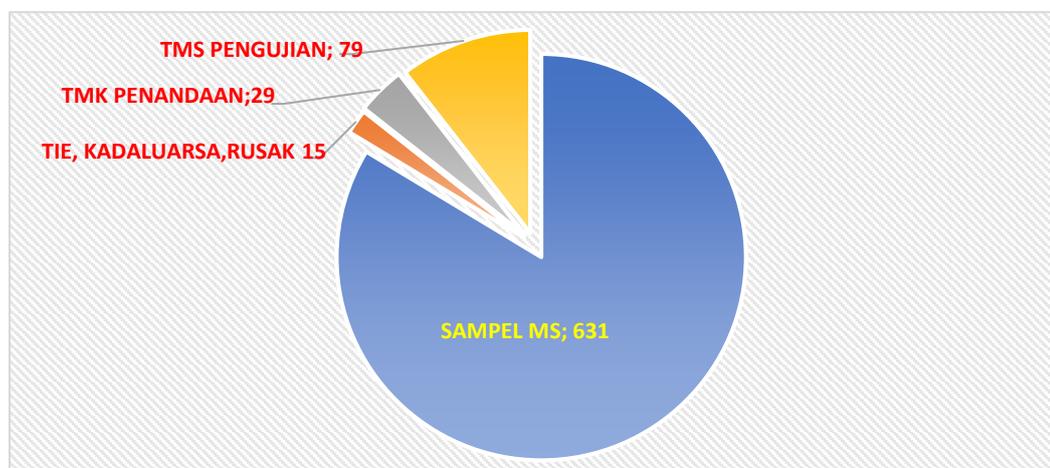
A.1.6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 3.10 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	71%	83,91%	118,18	Sangat Baik

Perhitungan persentase makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria bahwa obat yang tidak memenuhi syarat meliputi makanan yang tidak memiliki nomor ijin edar, makanan kadaluarsa/rusak, makanan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian. Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat sama dengan 100% dikurangi persen makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut.

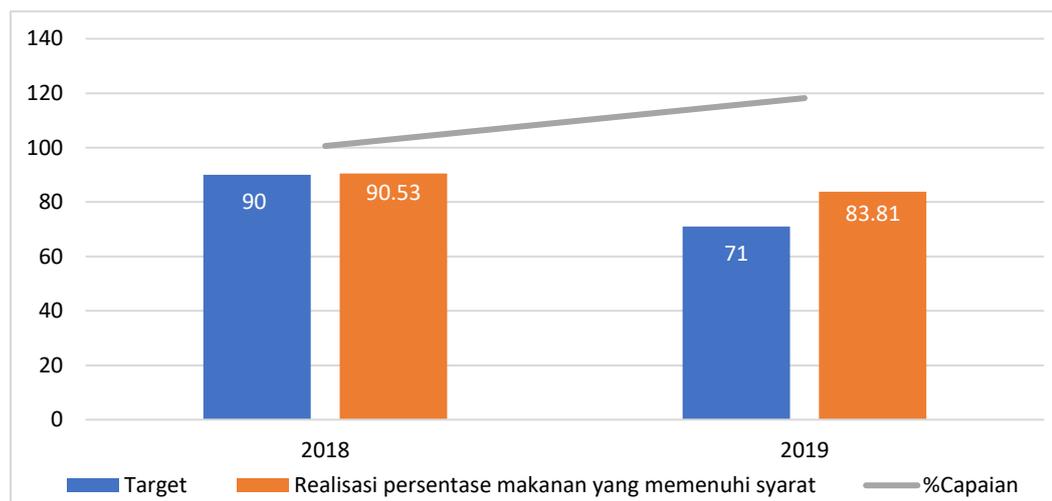
Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 adalah 83,91% dengan capaian kinerja 118,18% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria sangat baik. Nilai tersebut mengindikasikan masih ada produk makanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam kategori tanpa ijin edar (TIE), kadaluarsa, rusak dan TMK penandaan serta TMS pengujian sebagaimana terlihat pada gambar 3.15. Produk makanan yang TMS pengujian berjumlah 79 sampel dengan 42 sampel TMS pengujian kima, dan 37 sampel TMS pengujian mikrobiologi. Atas hasil tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bidang Pengujian dan Bidang Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pada pedoman tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh Badan POM.



Gambar 3.16 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara

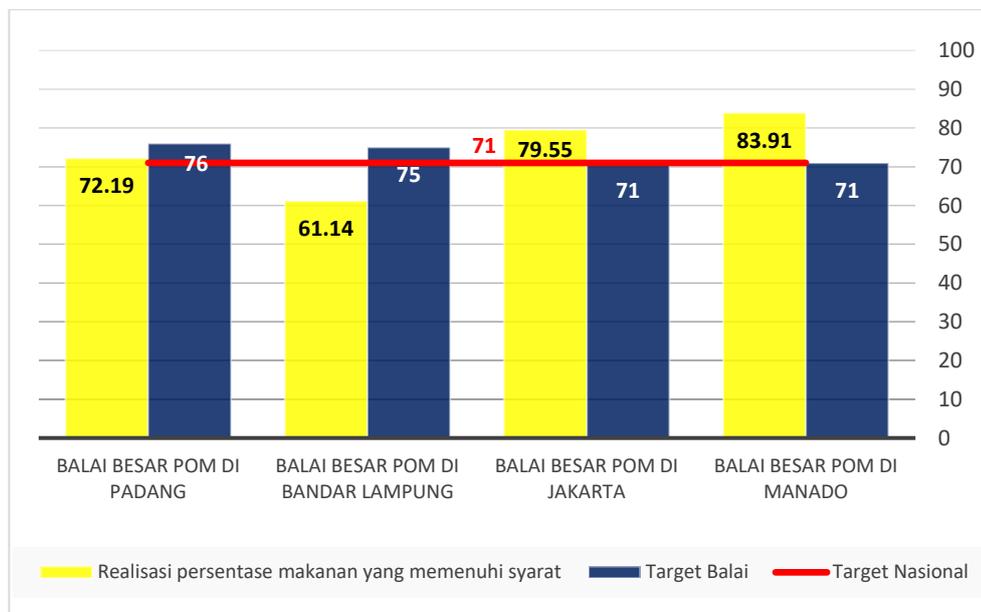
Jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya pada indikator persentase makanan yang memenuhi syarat, terjadi penurunan yaitu dari realisasi 90,53% dengan target 90,10% pada tahun 2018 menjadi realisasi 83,91% dengan target 71% pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada gambar 3.16. Penurunan nilai tersebut diakibatkan karena adanya perubahan metode perhitungan sampel MS hanya memperhitungkan sampel MS pengujian, dan tidak ada sampel TIE ataupun rusak dan kadaluarsa yang disampling. Sedangkan pada tahun 2019, sampel TIE, rusak, dan kadaluarsa dihitung sebagai sampel TMS termasuk juga sampel

TMK penandaan dan TMS peegujian. Perubahan itulah yang menyebabkan penurunan nilai persentase makanan yang memenuhi syarat. Melihat tren realisasi indikator persentase makanan yang memenuhi syarat telah melebihi target, maka nilai tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan target pada periode penyusunan rencana strategis (renstra) berikutnya. Meskipun secara persentase makanan yang memenuhi syarat mengalami penurunan, capaian kinerja indikator naik dari 100,59% menjadi 118,18% pada tahun 2019.



Gambar 3.17 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan nilai persentase makanan yang memenuhi syarat antar balai dalam satu *cluster* dapat dilihat pada gambar 3.18. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa tidak semua balai dapat mencapai target yang ditetapkan. Persentase makanan yang memenuhi syarat BBPOM Manado dan BBPOM Jakarta telah melewati target yang ditetapkan, namun BBPOM Padang dan BBPOM Bandar Lampung tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 71, hampir semua balai telah mencapai target nasional, kecuali BBPOM Bandar Lampung yang nilainya dibawah target nasional. Persentase makanan yang memenuhi syarat BBPOM Manado paling tinggi dibandingkan balai lain dalam satu *cluster*.



Gambar 3.18 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dalam Satu Cluster

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha Serta Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

A.2. Meningkatkan Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha Serta Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

Sasaran kegiatan 2 yaitu meningkatkan kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado yang merupakan *customer perspektif*, dihitung berdasarkan capaian nilai dua indikator yaitu indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado serta Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado.

A.2.1. Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

Tabel 3.11 Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

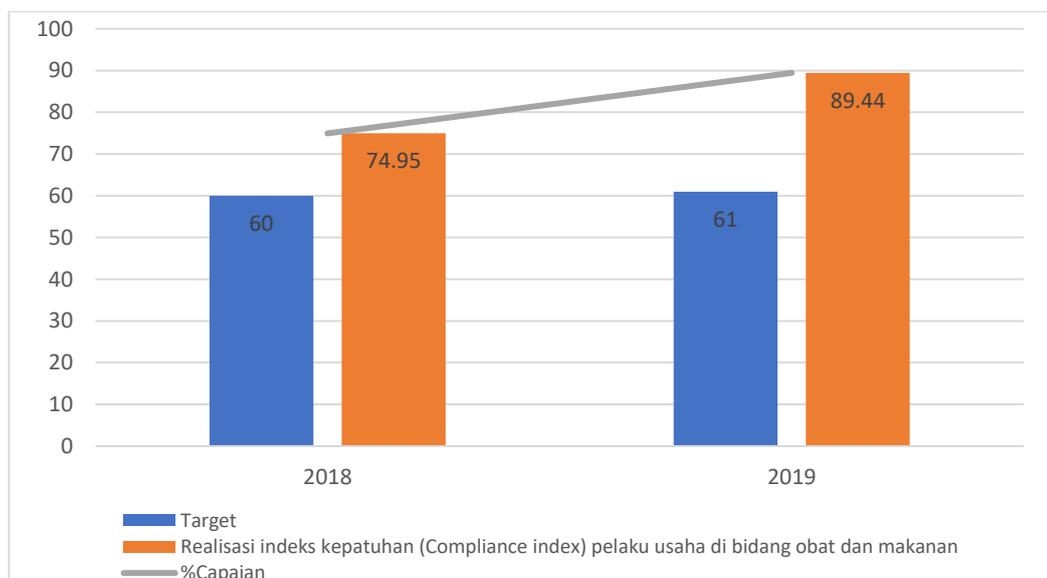
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Index Kepatuhan (<i>Compliance Index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado	61	89,44	146,62	Tidak dapat disimpulkan

Indikator pembentuk indeks kepatuhan pelaku usaha terdiri dari data hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP); sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP); sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan; hasil pengawasan iklan dan penandaan Obat dan Makanan; dan indikator industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR). Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan skala pembobotan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang terdiri dari Obat 0,233; Obat Tradisional 0,187; Kosmetik 0,173; Suplemen Kesehatan 0,178; dan Pangan Olahan 0,230.

Indeks Kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) kedalam pengklasifikasian/*grading* menjadi A (Baik), B (Cukup) dan C (Kurang). Selanjutnya dihitung persentase masing-masing *grading* untuk dianalisis secara statistik (*Top one box* atau *Top two boxes*). *Top one box* adalah $(A/\text{total} \times 100)$ dan *Top two boxes* adalah $(A+B/\text{total} \times 100)$. Hasil perhitungan indikator masing-masing komoditi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan selanjutnya dikalikan bobot AHP.

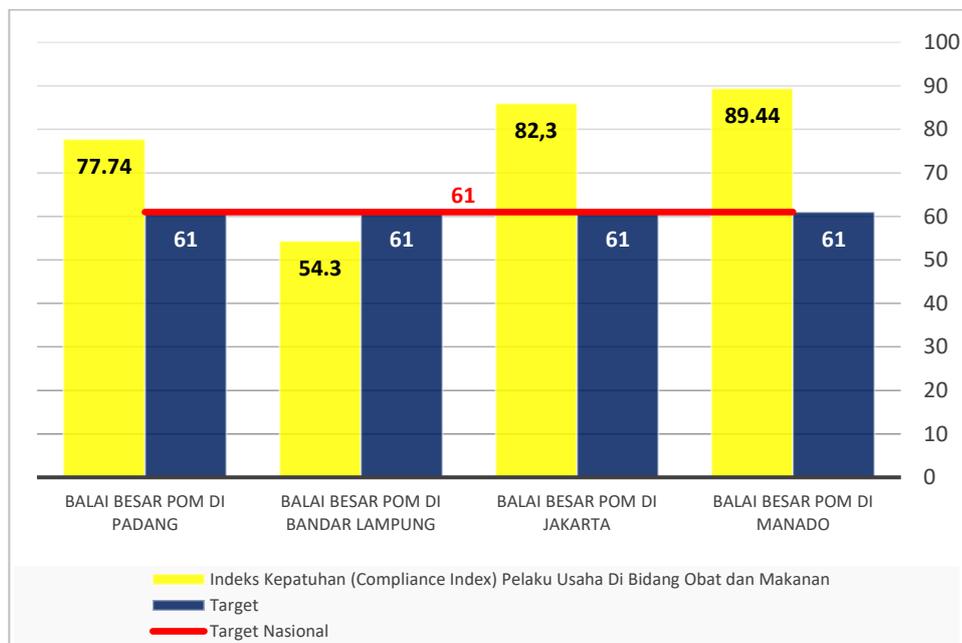
Capaian Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 146.62% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” karena di atas 120%. Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan wilayah kerja BBPOM di Manado memiliki indeks kepatuhan pelaku usaha yang tertinggi diantara Balai Besar/Balai/Loka POM di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan yang dilakukan BBPOM di Manado kepada pelaku usaha telah berhasil meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado.

Realisasi Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado pada tahun 2018 sebesar 74,95 dengan target yang ditetapkan adalah 60 (capaian kinerja 124,92). Berdasarkan data tersebut, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 maka tren realisasi Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado meningkat sebesar 14,80% dari tahun 2018.



Gambar 3.19 Perbandingan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan gambar 3.20 terlihat bahwa realisasi Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di 3 Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Jakarta, dan BBPOM di Manado melebihi target yang telah ditetapkan yang juga merupakan target nasional, kecuali Balai Besar POM di Bandar Lampung yang memiliki indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dibawah target yang ditetapkan. BBPOM di Manado memiliki realisasi Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat dan makanan yang tertinggi diantara 4 Balai Besar POM dalam satu *cluster*, bahkan tertinggi secara nasional.



Gambar 3.20 Perbandingan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Satu *cluster*

Nilai indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan yang cukup tinggi berhubungan dengan indikator-indikator pada sasaran kegiatan empat (Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis resiko di wilayah kerja BBPOM di Manado) dan sasaran kegiatan lima (Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado). Dari hasil capaian pada indikator-indikator di sasaran kegiatan empat dan lima, semua indikator mencapai

target, bahkan capaian beberapa indikator lebih dari 120% di bandingkan target yang ditetapkan.

Tingginya indeks kepatuhan pelaku usaha pada wilayah kerja BBPOM di Manado, dipengaruhi juga salah satunya dengan kegiatan inovasi yang dilakukan sebagai bentuk respon bagi pelaku usaha dalam hal ini produsen terkait pengurusan izin edar produk pangan. Inovasi tersebut yaitu Aplikasi yang berfungsi memantau masa berlaku izin produk makanan, yang diberi nama SI NONI (Sistem Notifikasi Elektronik). Melalui aplikasi tersebut dapat dipantau masa berlaku izin edar yang dimiliki pelaku usaha dan akan diberikan warning/peringatan bila masa berlaku izin edarnya tinggal 1 Tahun, 9 bulan, 4 bulan dan telah habis masa berlaku izin edarnya. Sehingga petugas BBPOM di Manado akan memberitahukan kepada pelaku usaha untuk segera melakukan perpanjangan izin edar. Aplikasi SI NONI merupakan Inovasi yang dibuat oleh BBPOM di Manado dan telah mendapatkan penghargaan pada tahun 2019 yang diberikan pada Rakernas 2019.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BBPOM di Manado untuk meningkatkan indeks kepatuhan Pelaku Usaha, antara lain :

- Bimtek terkait dengan CDOB yang melibatkan pelaku usaha dan Penanggung Jawab PBF dan IFK;
- Help Desk CAPA dan Pendaftaran Sertifikasi CDOB PBF;
- Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis e-registration pendaftaran pangan olahan;
- Sosialisasi peraturan PIRT/Pangan Olahan bagi inkubator Bisnis Teknologi (IBT) Universitas SamRatulangi;
- Workshop dan Monev Gerakan Labelisasi PANGBARASA;
- Pendampingan UMKM.

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan Audit Kinerja oleh Inspektorat Badan POM. Pada audit tersebut tidak ada temuan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, sehingga tidak terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh BBPOM di Manado.

A.2.2. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

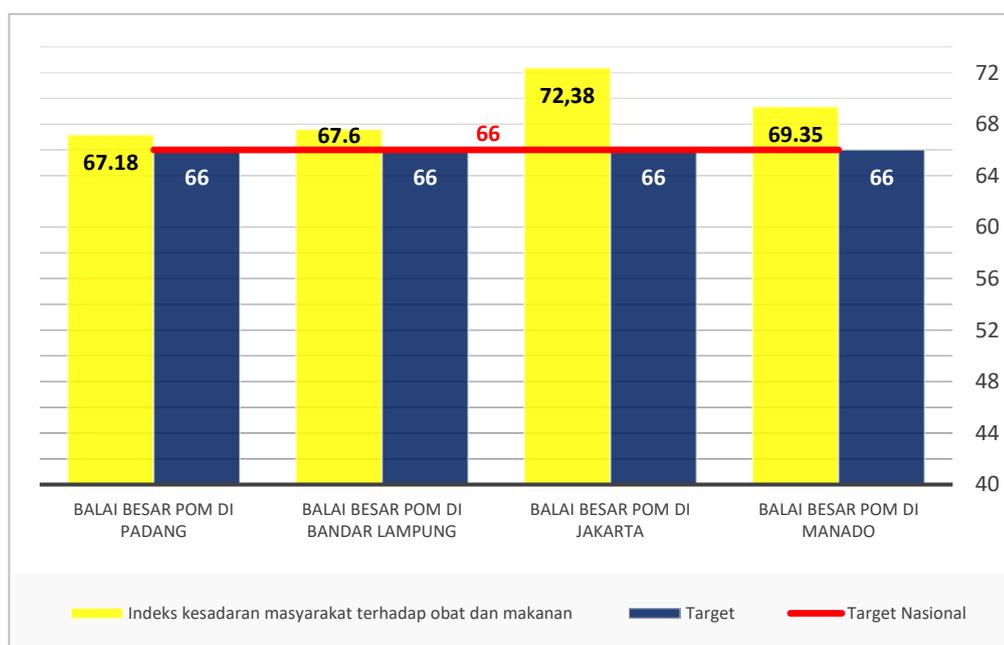
Tabel 3.12 *Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja BBPOM di Manado*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Manado	66	69,35	105,08	Baik

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah mengukur sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap Cek KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3,487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di *smartphone enumerator*.

Capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Manado, berdasarkan survey yang dilakukan oleh PRKOM adalah 69,35 dari target 66 sehingga capaian kinerja atas indikator ini adalah 105,08% dan dapat dikategorikan “Baik”. Nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan sebesar 69,35 dapat diartikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado cukup baik. Indeks kesadaran masyarakat merupakan indikator baru yang baru dilakukan pengukuran pada tahun 2019, sehingga tidak ada perbandingan nilai capaiannya dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan gambar 3.21 terlihat bahwa realisasi indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan dari semua balai dalam satu *cluster* telah melewati target yang ditetapkan yang merupakan target nasional yaitu 66. Nilai capaian indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan BBPOM Manado lebih rendah dari BBPOM Jakarta dengan nilai tertinggi yaitu 72,38, namun masih lebih tinggi daripada nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan BBPOM Bandar Lampung dan BBPOM Padang.



Gambar 3.21 Perbandingan Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan dalam Satu Cluster

Capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Manado, sangat dipengaruhi oleh indikator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman sebagai salah satu komponennya. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Manado dalam pencapaian indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan, antara lain :

- Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Keamanan Pangan dan Cerdas Memilih Obat, Obat Tradisional serta Produk Kosmetik yang aman bersama tokoh masyarakat dan lintas sektor terkait di wilayah Sulawesi Utara;
- Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman melalui Kegiatan Car Free Day yang terpusat di Kawasan Megamas Manado dengan melibatkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Asprindo)
- Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya melalui penyampaian Iklan Layanan Masyarakat di radio dan televisi lokal, spanduk, billboard, Media Sosial Instagram dan talkshow di media elektronik;
- Penyebaran informasi dengan menayangkan video edukasi dan pemberian media edukasi dalam bentuk leaflet, brosur tentang Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya pada even-even daerah melalui pameran, disetiap pertemuan yang dilakukan oleh BBPOM Manado dan di ruang tunggu konsultasi bagi konsumen yang melakukan konsultasi maupun pengaduan langsung;
- Sosialisasi dalam rangka kegiatan pengawalan Program Gerakan Keamanan Pangan Desa dengan penambahan komunitas yang baru dari setiap desa yang telah dilakukan intervensi di tahun sebelumnya;
- Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya

dilakukan di semua komunitas dengan batasan umur mulai dari usia Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi dengan kegiatan Mobil Laboratorium Keliling, komunitas yang diberdayakan Ibu PKK, perangkat desa, penjual/kelompok ritel pangan/ PKL (Pegadang Kreasi Lapangan), Industri Pangan Rumah Tangga melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa, komunitas sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA melalui program Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), komunitas Pramuka dan pedagang di pasar-pasar.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman

A.3. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman

Sasaran kegiatan 3 yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman yang merupakan *internal process perspektif*, dihitung berdasarkan capaian nilai indikator indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado.

A.3.1. Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

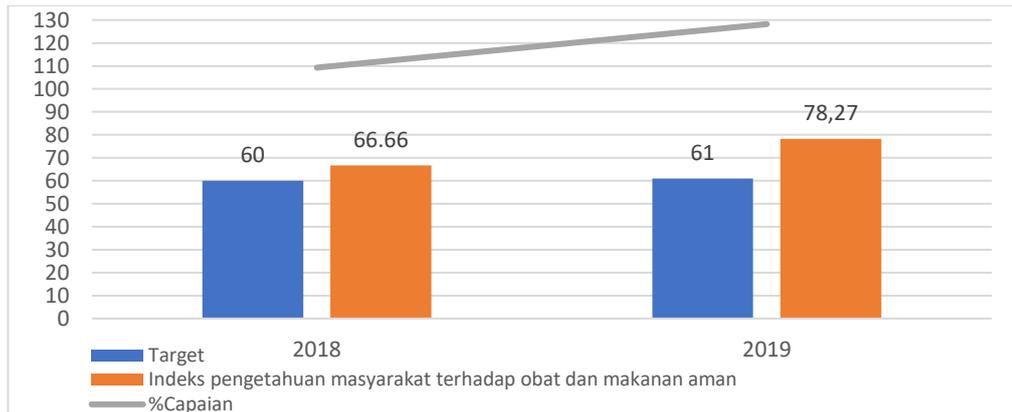
Tabel 3.13 Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Manado	61	78,27	128,31	Tidak dapat disimpulkan

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang telah dilakukan BBPOM di Manado. Survei yang dilakukan bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

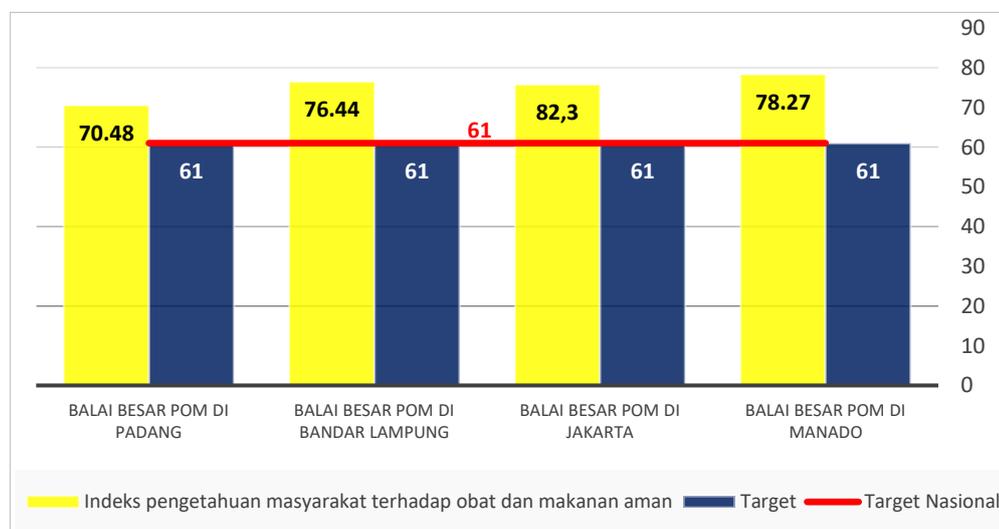
Capaian Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 128,31% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Namun demikian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan KIE BBPOM di Manado telah berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado.

Perbandingan persentase Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Manado Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar 3.22, dimana terjadi kenaikan capaian yaitu dari realisasi 60 dengan target 66,66 pada tahun 2018 menjadi realisasi 78,27 dengan target 61 pada tahun 2019. Kenaikan tersebut mengindikasikan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado karena banyaknya kegiatan serta inisiatif yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyebaran informasi obat dan makanan



Gambar 3.22 Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan gambar 3.23 terlihat bahwa realisasi indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman telah melebihi target yang ditetapkan yang juga merupakan target nasional yaitu 61. BBPOM di Manado memiliki realisasi indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman yang tertinggi diantara 4 Balai Besar POM dalam satu *cluster*. Realisasi capaian indeks pengetahuan masyarakat yang sudah jauh melebihi target yang ditetapkan dapat dijadikan dasar dalam penentuan target pada periode penyusunan rencana strategis berikutnya.



Gambar 3.23 Perbandingan Capaian Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dalam Satu cluster

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Manado hingga mendapatkan nilai Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman sebesar 78,27, antara lain :

- Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Keamanan Pangan dan Cerdas Memilih Obat, Obat Tradisional serta Produk Kosmetik yang aman bersama tokoh masyarakat dan lintas sektor terkait di wilayah Sulawesi Utara.
- Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman melalui Kegiatan Car Free Day yang terpusat di Kawasan Megamas Manado.
- Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya melalui penyampaian Iklan Layanan Masyarakat di radio dan televisi lokal, spanduk, billboard, Media Sosial Instagram dan talkshow di media elektronik.
- Penyebaran informasi dengan menayangkan video edukasi dan pemberian media edukasi dalam bentuk leaflet, brosur tentang Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya pada even-even daerah melalui pameran, disetiap pertemuan yang dilakukan oleh BBPOM Manado dan di ruang tunggu konsultasi bagi konsumen yang melakukan konsultasi maupun pengaduan langsung.
- Sosialisasi dalam rangka kegiatan pengawalan Program Gerakan Keamanan Pangan Desa dengan penambahan komunitas yang baru dari setiap desa yang telah dilakukan intervensi di tahun sebelumnya.
- Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya dilakukan di semua komunitas dengan batasan umur mulai dari usia Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi dengan kegiatan Mobil Laboratorium Keliling, komunitas yang diberdayakan Ibu PKK,

perangkat desa, penjual/kelompok ritel pangan/ PKL (Pegadang Kreasi Lapangan), Industri Pangan Rumah Tangga melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa, komunitas sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA melalui program Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), komunitas Pramuka dan komunitas Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

- Sosialisasi Pangan Aman bagi anak-anak PAUD yang diselengi dengan lomba mewarnai tingkat Kota Manado.

Tabel 3.14 Perbandingan Jumlah dan Jenis Layanan Publik Tahun 2017-2019

No	Jenis Layanan	Jumlah 2016	Jumlah 2017	Jumlah 2018	Jumlah 2019
1	Layanan permintaan informasi dan pengaduan konsumen melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)	236	161	320	388
2	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	5	1	4	3
3	Penyuluhan kepada masyarakat (bimtek, penyebaran informasi, talk show di TV, iklan di media cetak dan elektronik, permintaan narasumber)	37	44	34	72
4	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)	5	3	8	4
5	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE)	18	12	4	2
6	Pelayanan pengujian sampel pihak III (PNBP)	126	82	175	198
7	Layanan audit sarana dalam rangka sertifikasi, permohonan ijin edar, labelisasi Halal, permohonan SKI/SKE, dan ijin produksi	23	17	26	33
8	Penyebaran informasi di Loka Sangihe	-	-	-	4
Jumlah		450	320	571	704

Dari tabel 3.14 , jenis layanan yang dilakukan di BBPOM Manado pada tahun 2019 terdapat kenaikan jumlah layanan dibanding tahun 2018. Kenaikan antara lain terdapat pada layanan permintaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan pengujian sampel pihak III dan layanan audit sarana. Kenaikan layanan permintaan informasi dan pengaduan konsumen ini karena telah dibuka layanan permintaan informasi melalui media sosial BBPOM di Manado baik berupa website, facebook, instagram maupun whatsapp sehingga konsumen dapat meminta informasi darimanapun dan jam berapapun tanpa harus datang ke kantor dan mematuhi jam pelayanan yang ada. Kenaikan Penyuluhan kepada masyarakat (bimtek, penyebaran informasi, talk show di TV, iklan di media cetak dan elektronik, permintaan narasumber) terjadi juga karena perkembangan dunia digital yang begitu pesat sehingga edukasi kepada masyarakat disajikan juga dalam bentuk infografis, video dan iklan layanan masyarakat. Pelayanan pengujian sampel pihak III terjadi peningkatan karena semakin banyak pelaku usaha yang mendapat edukasi untuk taat aturan agar mendaftarkan produk IRTP nya. Kegiatan penyebaran informasi obat dan makanan pada seluruh komunitas juga dilakukan melalui :

- Penyebaran brosur, banner, poster, pemasangan billboard, dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat melalui media televisi dan radio, penyebaran informasi tentang obat dan makanan melalui media sosial Instagram dan facebook serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan;
- Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat Tradisional, dan Kosmetik melalui penyampaian Iklan Layanan Masyarakat di radio local di Kota Manado;
- Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukan pada saat Car Free Day di Kota Manado di

lokasi CFD Kawasan Megamas dengan melibatkan 1267 undangan dari lintas sektor dan pengunjung Car Free Day;

- KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan Yang Digunakan kepada 2010 orang di Kota Manado, 1000 orang di Kabupaten Minahasa Selatan, 300 orang mahasiswa di Universitas Negeri Manado, 100 orang di Kota Tomohon, 100 orang di Kota Bitung, 800 orang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan 70 orang Kabupaten Kepulauan Talaud;

Kegiatan lain yang mendukung pencapaian indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman antara lain :

- Program Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di 9 kabupaten kota di Sulawesi Utara pada 435 sekolah yang terdiri dari 288 SD/MI, 107 SMP/MTs dan 40 SMA/SMK/MA di Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Kepulauan Sangihe, Kota Manado dan Bitung. Dengan target 43 sekolah yang akan mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah di Sulawesi Utara, dalam pelaksanaannya BBPOM di Manado mampu melakukan program tersebut dan bisa mewujudkan 43 sekolah yang mendapat Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah;
- Hubungan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan antusias masyarakat desa termasuk perangkat desa yang diintervensi. Dukungan masyarakat ditunjukkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip Keamanan Pangan di desa sehingga dari ke 25 desa/kelurahan, tidak ada yang mengalami kejadian luar biasa keracunan pangan;
- Setiap tahun BBPOM di Manado mempunyai target pemberdayaan 3 desa baru dan pengawalan desa-desa yang sudah diintervensi di tahun tahun sebelumnya. Desa yang telah diintervensi antara lain :
 - Tahun 2014 ada 10 desa/kelurahan : Desa Tonsea Lama, Kelurahan Tataaran II, Kelurahan Talikuran Utara di Kabupaten

- Minahasa. Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kelurahan Buyungon, Kelurahan Ranomea di Kabupaten Minahasa Selatan. Kelurahan Winangun I, Ternate Baru, Ketang Baru dan Tuminting di Kota Manado.
- Tahun 2015 : Desa Dimembe, Desa Warukapas dan Kelurahan Airmadidi Bawah di Kabupaten Minahasa Utara.
 - Tahun 2016 : Kelurahan Kinilow, Paslaten Dua dan Walian di Kota Tomohon
 - Tahun 2017 : Kelurahan Girian Atas, Bitung Timur dan Pateten Satu di Kota Bitung
 - Tahun 2018 : Desa Belang, Wongkai dan Kelurahan Lowu I di Kabupaten Minahasa Tenggara
 - Tahun 2019 : Desa Bilalang I, Kobo Kecil dan Poyowa Besar Dua di Kota Kotamobagu.
 - Setiap tahun dilakukan Lomba Desa Pangan Aman terhadap desa yang telah diintervensi. Hal ini bertujuan untuk melihat konsistensi desa-desa dalam penerapan praktek Keamanan Pangan serta memotivasi desa-desa dalam peningkatan jumlah kader dan komunitas Keamanan Pangan.
 - Sebagai upaya peningkatan keamanan, mutu dan gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah di lingkungan sekolah dan pemberdayaan komunitas sekolah untuk memperkuat sistem manajemen keamanan pangan sekolah, Balai Besar POM melaksanakan Program Intervensi Keamanan Pangan Jajanan di 9 Kabupaten Kota di Sulawesi Utara. Dengan target 43 sekolah yang akan mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah di Sulawesi Utara. Kegiatan Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah dimulai dari tahapan Bimtek PJAS dengan target awal sebanyak 434 sekolah, BBPOM di Manado dapat melakukan bimtek terhadap 435 sekolah dikarenakan antusiasme sekolah yang sangat tinggi terhadap program tersebut. Pencapaian akhir dari program tersebut BBPOM di Manado mampu melakukan

program tersebut dan bisa mewujudkan 43 sekolah dari target yang ditetapkan untuk sekolah yang mendapat Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah;

- BBPOM di Manado juga melakukan kegiatan intervensi Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya baik melalui kegiatan penyuluhan pasar, bimtek petugas pasar dan monitoring evaluasi dari sampel yang dijual di pasar tersebut yang diduga mengandung bahan berbahaya. Pembentukan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya terdiri dari Pasar Bersehati di Kota Manado, Pasar Winenet di Kota Bitung, Pasar 23 Maret di Kota Kotamobagu, Pasar Tondano 1 di Kabupaten Minahasa, Pasar Beriman di Kota Tomohon dan Pasar Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko di Provinsi Sulawesi Utara

A.4. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko di Provinsi Sulawesi Utara

Sasaran kegiatan 4 yaitu meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis resiko di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 4 indikator kegiatan yaitu persentase pemenuhan pengujian sesuai standar, persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu serta rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan.

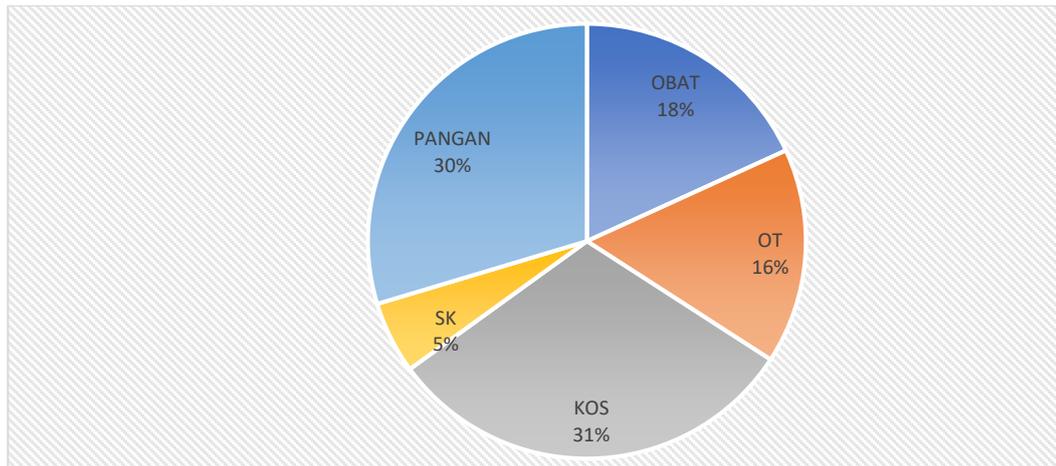
A.4.1. Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 3.15 Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Utara	100	95,05	95,05	Baik

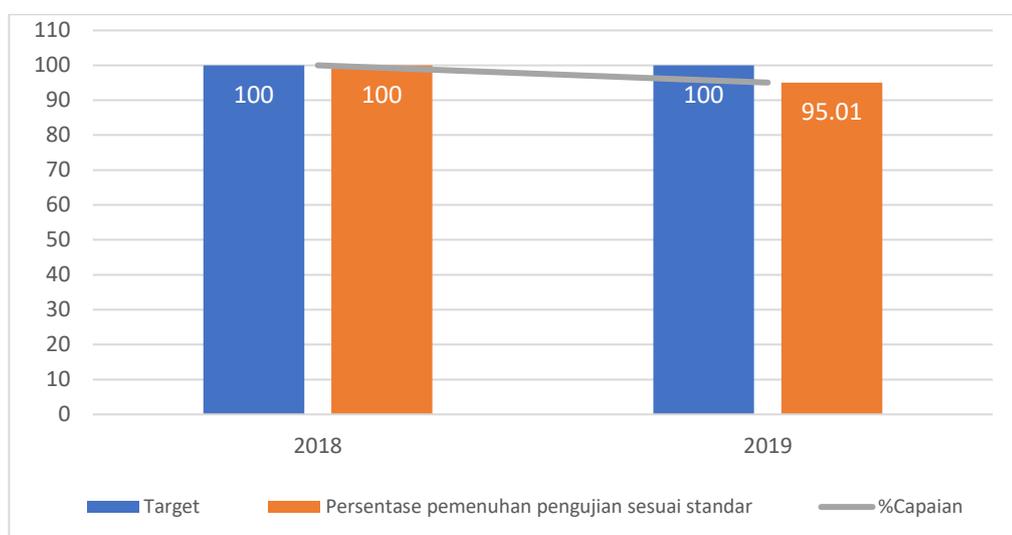
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar menggambarkan pengujian sampel yang dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan yaitu pengujian dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum pada pedoman sampling dan pengujian obat dan makanan Tahun 2019. Parameter uji kritis adalah parameter uji yang ditetapkan berdasarkan kajian resiko mutu dan keamanan yang dapat berpengaruh langsung pada kesehatan dengan mempertimbangkan bentuk sediaan dan sifat kimia fisika zat aktif.

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Utara adalah 95,05% dari target 100% sehingga capaian kinerja indikator ini 95,05% dan dikategorikan dalam kriteria baik. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa pengujian laboratorium BBPOM di Manado belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Persentase sampel yang diuji di laboratorium BBPOM di Manado per komoditi tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 3.24.



Gambar 3.24 Persentase Sampel per Komoditi yang Diuji di Laboratorium BBPOM di Manado

Perbandingan persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar 3.25 dimana terjadi penurunan capaian yaitu dari realisasi 100% dengan target 100% pada tahun 2018 menjadi realisasi 95,05% dengan target 100% pada tahun 2019. Penurunan nilai tersebut karena adanya kendala dalam pemenuhan pengujian sesuai dengan parameter kritis yang telah ditetapkan dalam prioritas sampling dan pengujian tahun 2019.



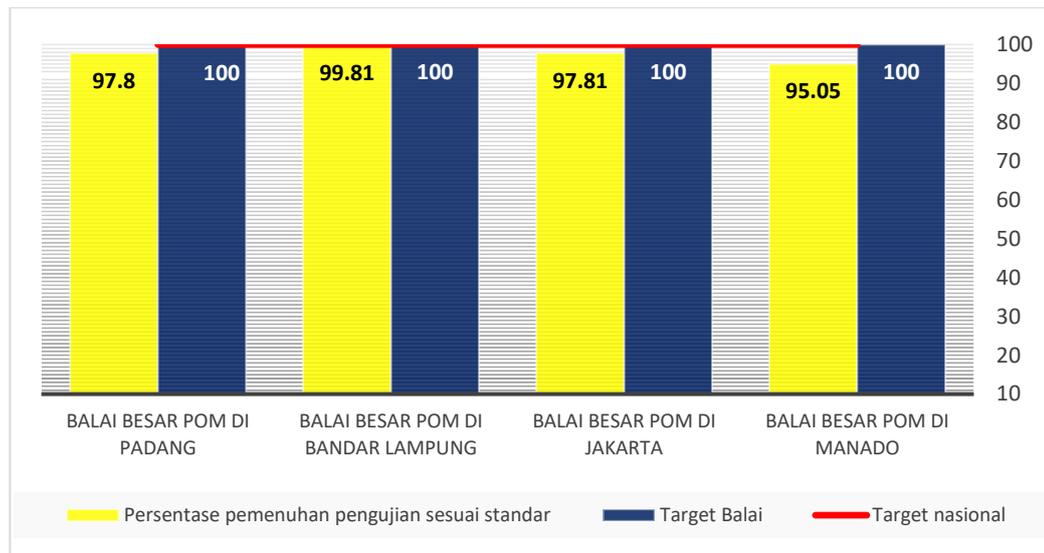
Gambar 3.25 Perbandingan Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar dengan Tahun Sebelumnya

Kendala yang dihadapi dalam rangka pemenuhan pengujian sesuai standar antara lain :

- Penggunaan alat khusus yang belum dimiliki seperti pada pengujian disolusi nifedipine;
- Tidak tersedianya baku pembanding untuk pengujian turunan sildenafil dan vitamin D;
- Metode analisis yang belum berhasil diaplikasikan dengan hasil yang memuaskan contohnya pada penetapan kadar vitamin D dalam suplemen kesehatan.

Atas kendala – kendala tersebut telah dikomunikasikan dengan P3OMN agar dapat menyediakan baku pembanding untuk parameter – parameter kritis yang telah ditentukan dalam prioritas sampling. Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut agar dapat memenuhi target pengujian sesuai dengan parameter kritis yang telah ditetapkan, maka BBPOM di Manado melakukan pengadaan mandiri beberapa baku pembanding yang masih memungkinkan diperoleh secara mandiri melalui mekanisme pengadaan langsung.

Perbandingan nilai persentase pemenuhan pengujian sesuai standar antar balai dalam satu *cluster* dapat dilihat pada gambar 3.26. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa semua balai tidak mencapai target yang ditetapkan. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar BBPOM Manado paling rendah jika dibandingkan balai lain dalam satu *cluster*. Nilai capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan target pada penyusunan rencana strategis periode berikutnya.



Gambar 3.26 Perbandingan Nilai Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar Antar Balai dalam Satu Cluster

A.4.2. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah kerja BBPOM di Manado

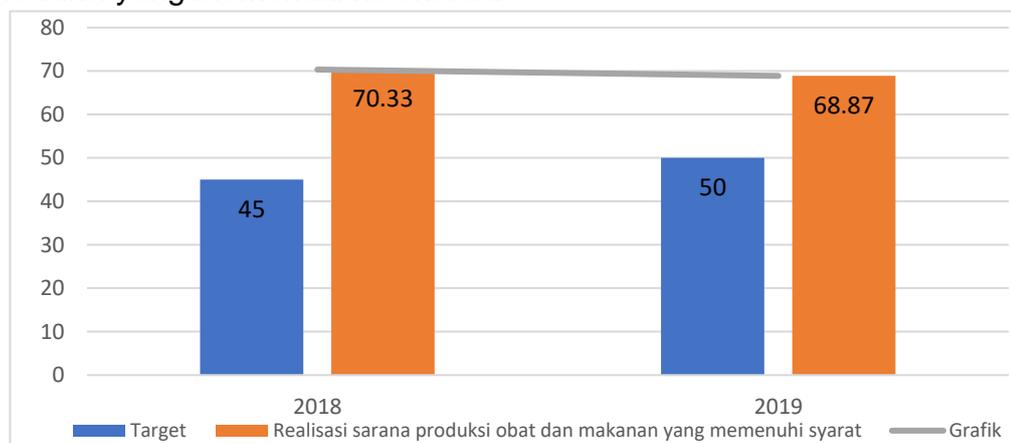
Tabel 3.16 Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah kerja BBPOM di Manado

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah kerja BBPOM di Manado	50	68,87	137,74%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan merupakan gambaran kepatuhan para pelaku usaha di bidang produksi obat dan makanan di wilayah Sulawesi Utara. Perhitungan persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat dilakukan terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM Manado dan telah diintervensi pada tahun 2019 yaitu terdiri dari industri pangan MD dan industri rumah tangga pangan.

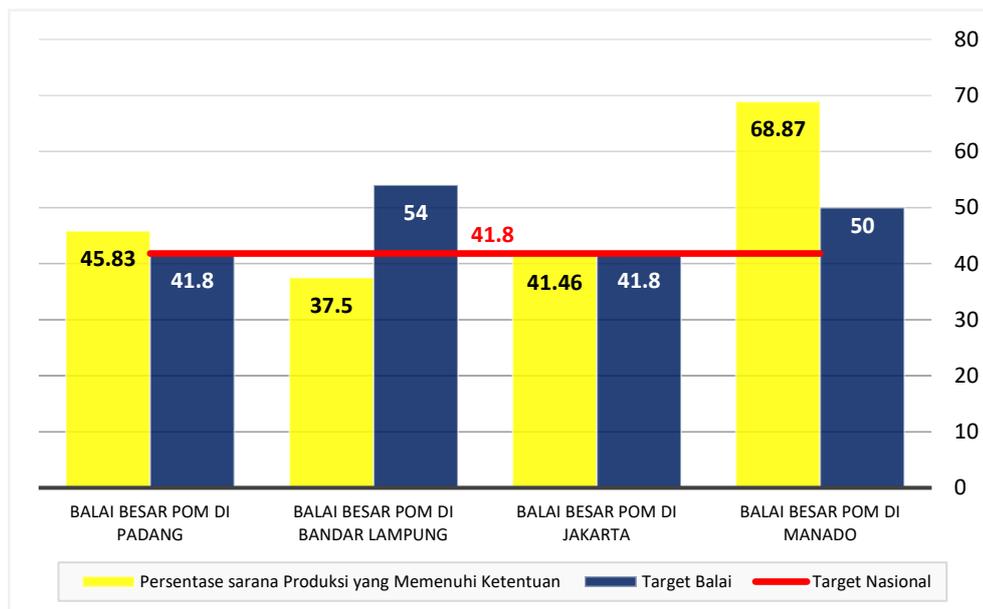
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado adalah 68,87%, dengan persen capaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 137,74%. Nilai capaian yang jauh melebihi target disebabkan karena beberapa sarana produksi yang telah diinspeksi sebelumnya telah melakukan perbaikan, sehingga pada saat diinspeksi pada tahun 2019 hasilnya memenuhi ketentuan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, persen capaian kinerja indikator sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2019 turun sebesar 11,87%. Penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2019 ini, jumlah sarana produksi industri rumah tangga pangan yang diperiksa meningkat jumlahnya, yang berkontribusi pada penurunan jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan. Peningkatan jumlah sarana produksi industri rumah tangga pangan yang diperiksa, dikarenakan adanya Program Manajemen Resiko (PMR) dari Badan POM untuk industri ikan kaleng yang banyak berada di Sulawesi Utara, sehingga industri yang telah mendapatkan sertifikat PMR tidak menjadi prioritas pemeriksaan karena dianggap telah mampu secara mandiri mendeteksi potensi risiko. Melihat tren hasil pengawasan sarana produksi dua tahun terakhir yang jauh melebihi target yang telah ditetapkan, perlu dievaluasi kembali penetapan target atas indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan.



Gambar 3.27 Perbandingan Capaian Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan gambar 3.28 diketahui bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado sudah melebihi target yang ditetapkan, dengan nilai persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan paling tinggi diantara 4 balai dalam satu *cluster*. Hampir semua Balai sudah melebihi target yang telah ditetapkan dan juga target nasional yaitu 41,8% kecuali Balai Lampung yang masih berada dibawah target.



Gambar 3.28 Perbandingan Capaian Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan dalam Satu Cluster

Beberapa hal yang telah dilakukan BBPOM di Manado sehingga mencapai realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 68.87%, antara lain:

- Adanya program reward (penghargaan) dari Badan POM kepada sarana pangan resiko tinggi (produk makanan kaleng, produk susu, produk olahan daging) yang memiliki sistem manajemen Resiko yang telah terqualifikasi yaitu dengan pemberian Piagam PMR (Program Manajemen Resiko). Reward yang diterima oleh sarana berupa tidak menjadi target inspeksi rutin dan sampling selama periode waktu tertentu;

- Dalam melakukan inspeksi sarana Produksi, petugas BBPOM di Manado juga memberikan pembinaan dan solusi terhadap temuan atau penyimpangan yang didapatkan, sehingga hal tersebut membantu para pelaku usaha untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan;
- Dalam pembuatan *Corrective Action dan Preventive Action (CAPA)* petugas siap melakukan diskusi dengan para pelaku usaha apabila mendapatkan kesulitan dalam pembuatan CAPA;
- BBPOM di Manado telah memberikan pelatihan kepada petugas pengawas di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Utara, sehingga diharapkan petugas tersebut dapat melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha di wilayah kerjanya. Selanjutnya BBPOM di Manado melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan sarana produksi yang telah dilakukan oleh tenaga pengawas di Kabupaten/Kota;
- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas BBPOM di Manado yaitu Pelatihan Food Inspector (FI), Bimtek Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, Bimtek Pengawasan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Dengan meningkatnya kompetensi petugas BBPOM di Manado, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.

Beberapa kendala dalam pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan adalah terbatasnya tenaga pengawas di BBPOM di Manado sehingga tidak dapat mengintervensi seluruh industri yang berada di Sulawesi Utara, khususnya industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Masih adanya sarana industri rumah tangga pangan yang aktif ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri atau pun Hari Raya Natal kemudian tidak aktif lagi setelahnya, juga menjadi kendala pengawasan sarana produksi di wilayah kerja BBPOM di Manado.

Atas hasil rekomendasi audit inspektorat terkait penyusunan analisis resiko dan penentuan prioritas dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta penentuan kesimpulan hasil pemeriksaan yang harus dituangkan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan, BBPOM di Manado telah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Badan POM. Sebagai bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, pada tahun 2020, digunakan aplikasi yang dapat mendukung analisis resiko yaitu ASTAGA (Aplikasi Surat Tugas).

A.4.3. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

Tabel 3.17 Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado

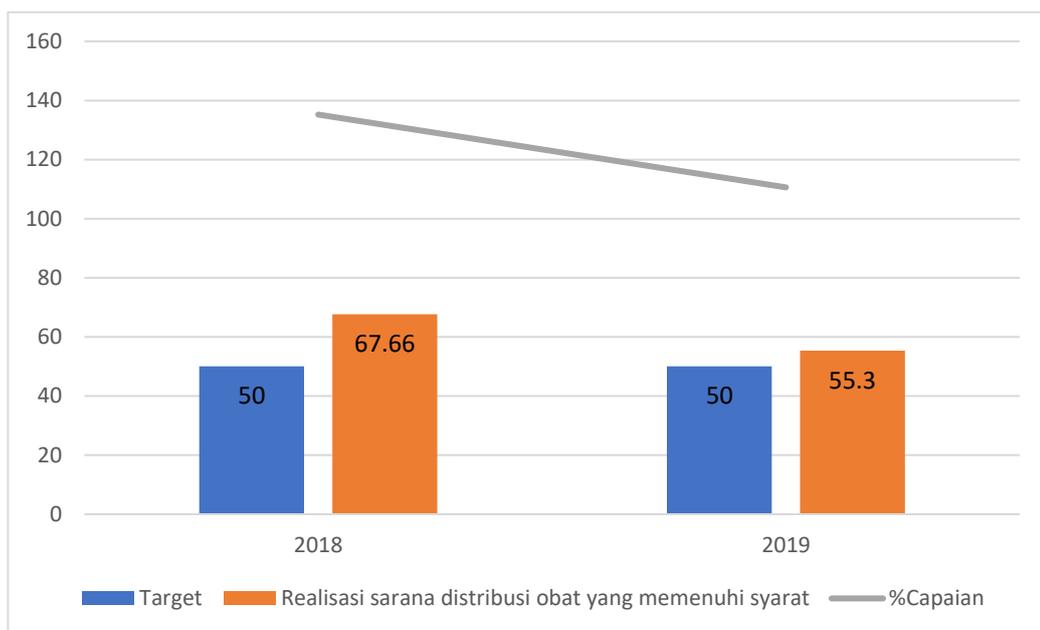
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah kerja BBPOM di Manado	50	55,3	110	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan merupakan kepatuhan pelaku usaha dibidang distribusi obat di wilayah Sulawesi utara. Perhitungan dilakukan terhadap hasil pemeriksaan sarana Distribusi obat yang meliputi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Kota/Kabupaten dan/atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Rumah Sakit, Puskesmas, serta Klinik. Total sarana distribusi obat yang di intervensi pada tahun 2019 sejumlah 320 sarana, dengan persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan sebesar 55,3% dengan target yang ditetapkan sebesar 50%.

Berdasarkan Jenis sarana, sarana yang paling banyak tidak memenuhi ketentuan adalah sarana PBF dengan persentase sebesar 76.20%, diikuti oleh Toko obat sebesar 66.67%, kemudian Instalasi farmasi Kabupaten/Kota sebesar 64.28%. Hal itu disebabkan karena banyak Apoteker Penanggung Jawab PBF yang mengundurkan diri dan Apoteker

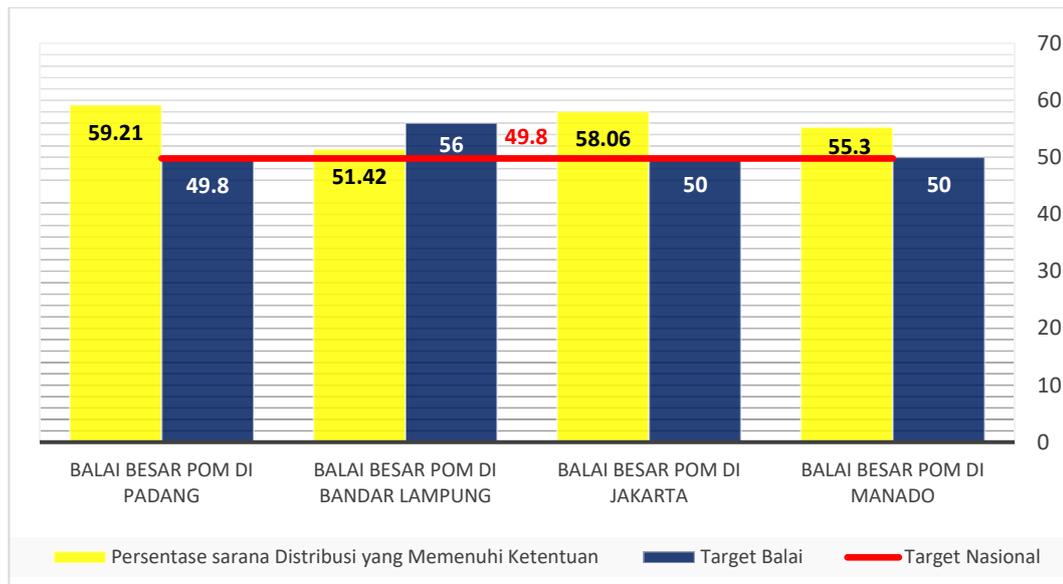
pengganti belum pernah mendapatkan pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pemahaman Apoteker tentang CDOB sangat kurang.

Jika dibandingkan dengan persentase capaian kinerja indikator tahun 2018 sebesar 135,22%, maka persentase capaian tahun 2019 terhadap target yang ditetapkan lebih baik karena pada tahun 2019 kriteria capaian adalah “Sangat Baik” sedangkan pada tahun 2018 capaian kinerja tidak dapat disimpulkan.



Gambar 3.29 Perbandingan Capaian Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan gambar 3.30 diketahui bahwa realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan dalam satu *cluster*, hampir semua Balai pada *cluster* tersebut melebihi target yang telah ditentukan, kecuali capaian BBPOM Lampung, capaian kinerjanya dibawah target yang telah ditentukan namun jika dibandingkan dengan target nasional, semua Balai telah melebihi target nasional. Persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan di wilayah BBPOM di Manado, berada diatas BBPOM Lampung, akan tetapi masih berada dibawah capaian BBPOM Padang dan BBPOM Jakarta.



Gambar 3.30 Perbandingan Capaian Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan dalam Satu Cluster

Hal yang sangat berperan dalam mencapai target salah satunya adalah Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) serta penerapan sanksi (Sanksi administratif meliputi Peringatan, Peringatan Keras, dan Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)) sesuai ketentuan terhadap pelanggaran pengelolaan obat mulai dari pengadaan, penyimpanan, penyerahan, penyaluran, dan dokumentasi, termasuk penjualan produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi obat adalah terbatasnya tenaga pengawas di BBPOM di Manado, sehingga terkadang dalam melakukan pengawasan dilakukan bersamaan kegiatan lain seperti sampling dan pengawasan iklan. Selain itu, Sistem Aplikasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang digunakan untuk melakukan pelaporan oleh BBPOM di Manado sering mengalami gangguan dan kecepatan aksesnya lambat, sehingga menyebabkan keterlambatan dan gangguan dalam melakukan pelaporan. Terkendalanya SIPT, sering mejadi masalah terutama jika kinerja Balai hanya dilihat atas data yang ada pada SIPT.

Kendala lainnya yang berasal dari eksternal yaitu terkait dengan keterbatasan Tenaga Farmasi baik Apoteker ataupun Tenaga Teknis Kefarmasian di Sulawesi Utara. Sebagian besar sarana pelayanan farmai yang berada di Sulawesi Utara tidak memiliki Apoteker Penanggung Jawab atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja penuh (*Full Time*), sehingga pengelolaan obat dilakukan oleh personel yang tidak kompeten.

Beberapa kegiatan dan program yang dilakukan BBPOM di Manado untuk menunjang keberhasilan indikator ini adalah:

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas BBPOM di Manado, antara lain Pelatihan CDOB bagi petugas Balai. Dengan meningkatnya kompetensi petugas BBPOM di Manado, maka diharapkan hasil pemeriksaan sarana distribusi juga lebih berkualitas;
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi obat yang melibatkan Pemerintah daerah dan Dinas terkait, serta penanggung jawab dan pemilik sarana Distribusi Obat yaitu Apotek, Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Toko Obat;
- Bimtek CDOB yang dilaksanakan dengan mengundang Seluruh PBF yang berada di Sulawesi Utara dan IFK dari 12 Kabupaten/Kota yang berada di Sulawesi Utara;
- Pada saat inspeksi, petugas juga melakukan Pembinaan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana

Atas hasil rekomendasi audit inspektorat terkait penyusunan analisis resiko dan penentuan prioritas dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi serta penentuan kesimpulan hasil pemeriksaan yang harus dituangkan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan, BBPOM di Manado telah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Badan POM. Sebagai bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, pada tahun 2020, digunakan aplikasi yang dapat mendukung analisis resiko yaitu ASTAGA (Aplikasi Surat Tugas).

A.4.4. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

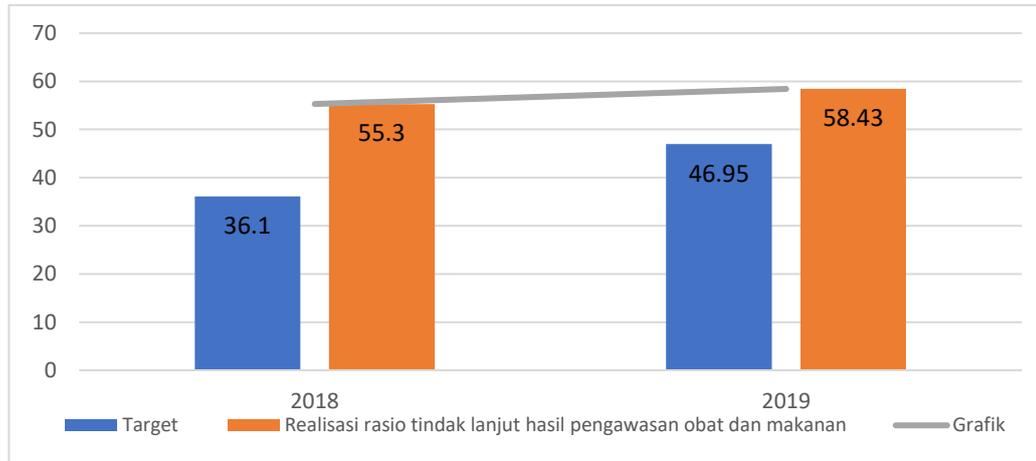
Tabel 3.18 Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado	46,95	58,43	124,45	Tidak dapat disimpulkan

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan merupakan *feedback* dari pelaku usaha dan atau Lintas sektor terhadap tindak lanjut atau rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Manado. Realisasi pada tahun 2019 yaitu sebesar 58,43% dengan target yang ditentukan 46,95%. Capaian tersebut telah melebihi target yang ditentukan dengan persentase capaian sebesar 124,45% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Namun hal ini menggambarkan respon yang baik dari lintas sektor dan pelaku usaha terhadap tindak lanjut yang diberikan oleh BBPOM di Manado. Hal ini dipengaruhi oleh terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menyebutkan salah satu peran Badan POM yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait serta mengawal tindak lanjutnya dan didukung dengan terbitnya Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan ini juga dipengaruhi oleh adanya perjanjian kerjasama (PKS) antara BBPOM di Manado dengan beberapa kepala daerah yang ada di Sulawesi Utara.

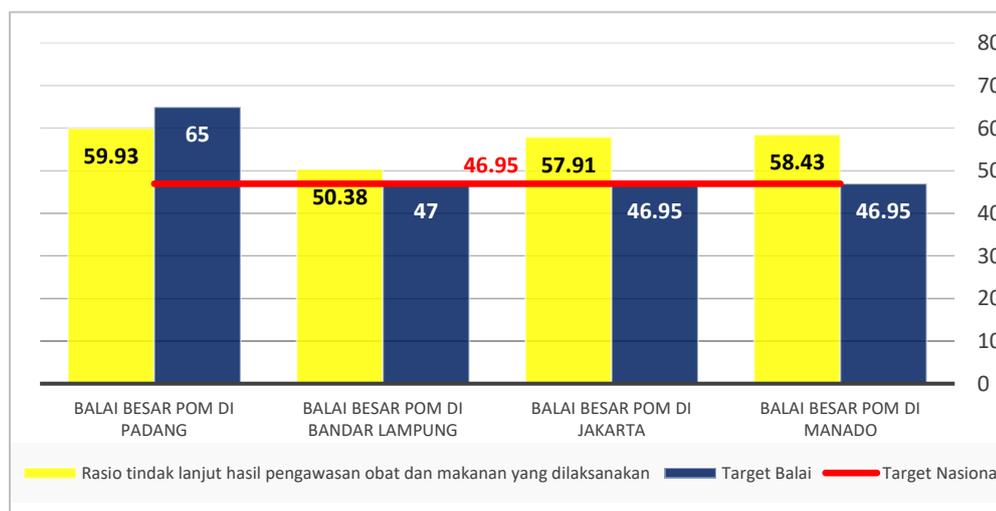
Tren Realisasi Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan ini terus menanjak dari tahun ke tahun. Realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 55,30%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 58,43%. Hal ini

menggambarkan respon yang makin baik dari lintas sektor dan pelaku usaha terhadap tindak lanjut yang diberikan oleh BBPOM di Manado.



Gambar 3.31 Perbandingan Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan gambar 3.32 diketahui bahwa realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado, Balai Besar POM di Jakarta, dan Balai Besar POM di Bandar Lampung sudah melebihi target yang ditetapkan termasuk juga terhadap target nasional. BBPOM di Manado memiliki capaian realisasi tertinggi terhadap target yang telah ditetapkan dibandingkan 3 balai lainnya dalam satu *cluster*.



Gambar 3.32 Perbandingan Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dalam Satu *Cluster*

Keberhasilan pencapaian ini merupakan hasil dari Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM dan Manado baik terhadap Pelaku usaha atau pun terhadap lintas sektor yang dilaksanakan secara intens. Komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci peningkatan rasio tindak lanjut.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan BBPOM di Manado dalam menunjang keberhasilan antara lain :

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Sarana mengundang pelaku usaha, serta tenaga pengawas di Kabupaten/Kota yang telah dilatih;
- Pendekatan secara formal ataupun informal dan koordinasi baik terhadap Pelaku usaha atau pun terhadap lintas sektor yang dilaksanakan secara intens.

Banyaknya komoditi dan jenis sarana yang diawasi dengan keterbatasan petugas inspeksi menjadi kendala dalam menindaklanjuti hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan. Begitu juga dengan regulasi yang sangat dinamis menuntut setiap petugas dapat memahami kategori temuan dan bagaimana sanksinya. Sementara untuk setiap komoditi memiliki ketentuan yang berbeda dan peraturan yang cukup banyak dari level Undang-undang hingga setingkat Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga bahkan Peraturan Daerah. Sehingga peningkatan kompetensi petugas diharapkan selalu menjadi salah satu prioritas untuk mendukung kinerja khususnya dalam membuat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Tantangan dari eksternal terkait tindak lanjut hasil pengawasan adalah keterbatasan SDM dan kurangnya alokasi anggaran daerah terhadap pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan adanya alokasi dana DAK pada tahun 2020 ini dapat meningkatkan tindak lanjut pengawasan di daerah.

Pada Audit Kinerja oleh Inspektorat Badan POM tahun 2019, tidak ditemukan kendala terkait dengan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan, sehingga tidak terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh BBPOM di Manado.

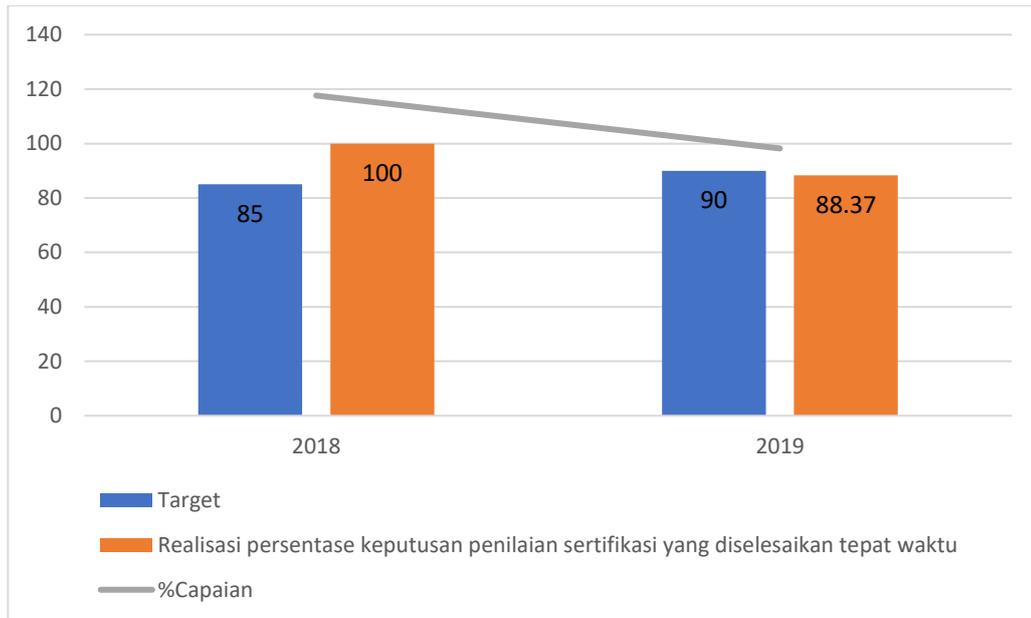
A.4.5. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

Tabel 3.19 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BBPOM di Manado	90%	88,37%	98,2	Baik

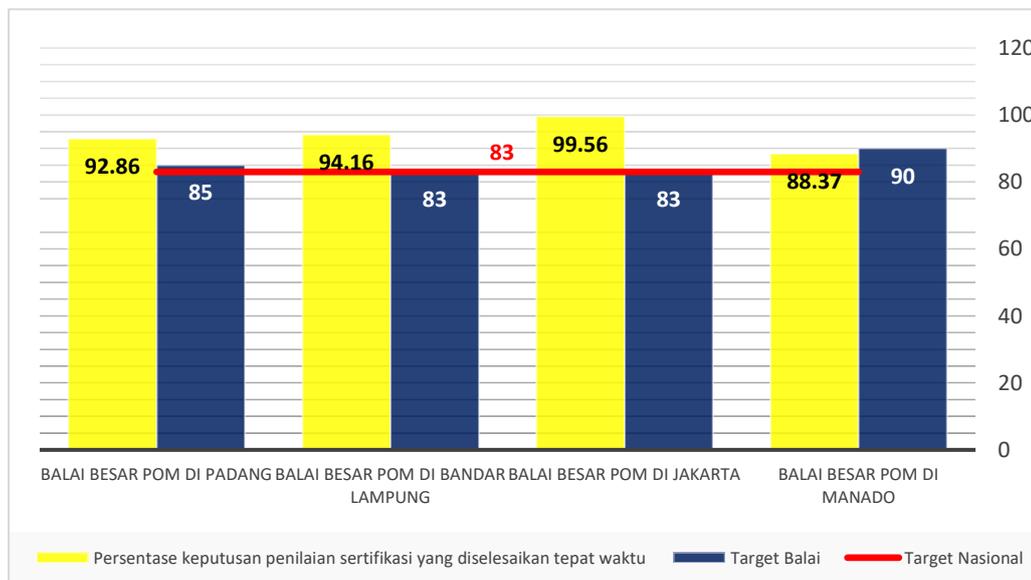
BBPOM di Manado melakukan evaluasi penilaian sertifikasi meliputi pelayanan terkait rekomendasi/sertifikasi CPPOB dan CDOB, Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Impor, dan Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ekspor. Pada tahun 2019 terdapat sejumlah 43 permohonan rekomendasi/sertifikasi dan telah menerbitkan sertifikat sejumlah 38 rekomendasi/sertifikat sesuai dengan time line. Persentase capaian atas indikator ini adalah 98,2% dengan kriteria “Baik”.

Realisasi pada tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018. Pada tahun 2019 realisasi sebesar 88,37% dari target sebesar 90%, sedangkan pada tahun 2018 realisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Beberapa rekomendasi yang tidak diterbitkan rekomendasi atau sertifikatnya tepat waktu adalah karena pengajuan permohonannya akhir tahun sehingga belum dapat ditindaklanjuti permohonannya.



Gambar 3.33 Perbandingan Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan gambar 3.34 diketahui bahwa realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh BBPOM di Manado paling rendah di banding dengan balai lain dalam satu *cluster*, meskipun target yang ditetapkan paling tinggi diantara yang lain. Namun demikian, capaian BBPOM di Manado masih dalam kriteria “Baik”.



Gambar 3.34 Perbandingan Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam Satu Cluster

Beberapa hambatan dan tantangan Internal dalam pelaksanaan penilaian sertifikasi diantaranya adalah keterbatasan SDM, serta perlunya penguatan SDM tidak hanya dalam hal kompetensi teknis tetapi juga kemampuan berinovasi untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. Kurangnya pengetahuan/pemahaman pelaku usaha terkait pembuatan SOP, persyaratan penanggungjawab sarana serta tindakan perbaikan. Selain itu, keterbatasan anggaran dari pelaku usaha untuk melakukan pengujian lengkap serta perbaikan sarana agar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan juga sering menjadi kendala dalam pemenuhan sertifikasi yang dikeluarkan tepat waktu.

Selain itu BBPOM di Manado telah melakukan beberapa upaya yang menunjang keberhasilan dalam mencapai Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BBPOM di Manado melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

- Help Desk CAPA dan Pendaftaran Sertifikasi CDOB PBF;
- Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis e-registration pendaftaran pangan olahan;
- Sosialisasi peraturan PIRT/Pangan Olahan bagi incubator Bisnis Teknologi (IBT) Universitas SamRatulangi;
- Workshop dan Monev Gerakan Labelisasi PANGBARASA;
- Pendampingan UMKM.

Pada Audit Kinerja oleh Inspektorat Badan POM tahun 2019, tidak ditemukan kendala terkait dengan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, sehingga tidak terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh BBPOM di Manado.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

A.5. Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

Sasaran Kegiatan ke-5 yaitu meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado yang merupakan *internal process perspektif*, dihitung berdasarkan capaian nilai persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Manado.

A.5.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

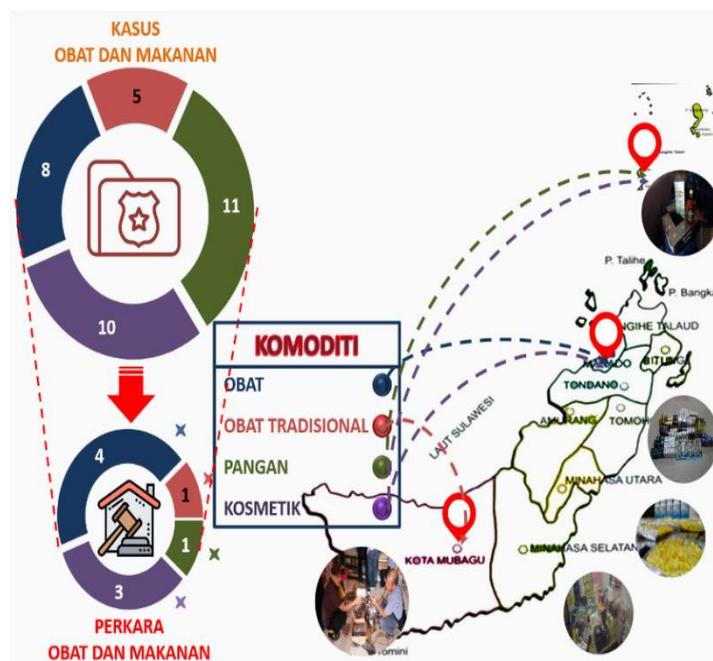
Tabel 3.20 Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II di Wilayah Kerja BBPOM di Manado

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II di Wilayah Kerja BBPOM di Manado	50%	52,94%	105,88	Baik

Capaian persentase perkara yang diselesaikan sampai tahap II yaitu proses penyerahan tersangka berikut barang bukti kepada jaksa setelah dinyatakan berkas perkara lengkap (P.21) untuk kemudian diajukan ke pengadilan dibagi perkara yang telah diterbitkan SPDP. Untuk pengukuran kinerja tahun 2019, maka yang diukur adalah proses pemberkasan terkait perkara yang carry over yaitu perkara yang belum selesai hingga Tahap II hingga tahun 2018 ditambah dengan perkara pada tahun 2019. Perkara yang carry over berjumlah 7 perkara dengan proses penyelesaian perkara yaitu 6 perkara sudah tahap II dan 1 perkara masih dalam pemeriksaan oleh

pihak kejaksaan (Tahap I). Perkara pada tahun 2019 adalah 9 Perkara dengan rincian sebagai berikut; 2 perkara sampai putusan pengadilan; 1 perkara tahap II; 3 Perkara sudah P.21; dan 3 perkara SPDP. Pemberkasan perkara yang masih belum tuntas pada tahun sebelumnya diselesaikan pada tahun ini dengan menggunakan anggaran tahun berjalan. Oleh karena itu, pada indikator ini memperhitungkan penyelesaian perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya agar tidak menggantung.

Dari hasil penyelesaian berkas perkara, maka capaian indikator kegiatan tersebut 52,94 % dari target 50 %. Capaian tersebut telah



melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2019, namun lebih rendah dari capaian tahun 2018 yaitu 53,85 %. Tahun 2018 menangani 13 perkara dengan 7 perkara telah Tahap II, sementara tahun 2019 menangani 17 perkara dengan 9 perkara telah tahap II.

Gambar 3.35 Penanganan Kasus serta Perkara Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Utara

Capaian Indikator tersebut yang telah melebihi target masih memerlukan perbaikan untuk masa mendatang. Penyelesaian pemberkasan perkara memerlukan komitmen kuat serta komunikasi yang cair dengan pihak kejaksaan. Semakin cepat proses pemberkasan perkara, semakin cepat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku yang disangkakan pelanggaran pidana di bidang Obat dan Makanan.

Salah satu kendala yang dihadapi yaitu tindak pidana dibidang obat dan makanan tidak selalu ada korban yang merasakan dampak dari

konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat maupun yang mengandung bahan berbahaya. Dampak yang dirasakan bersifat jangka panjang dan akumulasi setelah mengkonsumsi dalam waktu lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendukung bahaya konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat maupun mengandung bahan berbahaya sehingga dapat memberikan keyakinan bagi hakim dalam memberikan keputusan pengadilan.

Tindak pidana di bidang kejahatan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Utara trend dominan yang terjadi yaitu terkait peredaran kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon, yang selama ini terdeteksi masuk dari Pulau Jawa melalui manado kemudian diedarkan ke kabupaten diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara untuk jamu mengandung bahan kimia obat masih banyak beredar di Kota Kotamobagu. Pola yang berhasil dilacak melalui pengiriman langsung dari Pulau Jawa masuk melalui manado ataupun langsung menuju Kotamobagu. Kasus selanjutnya yang masih menjadi Trend pada tahun 2018 yaitu penggunaan bahan berbahaya pada makanan, terutama penggunaan bahan berbahaya boraks sebagai pengental di mie basah sudah tidak ditemukan secara masif di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dari hasil pengawasan makanan tahun 2019. Trend selanjutnya yang dapat diungkap yaitu masuknya minuman beralkohol ilegal dari filiphina yang tanpa izin edar dan tanpa cukai. Penyalahgunaan obat juga masih menjadi trend pada tahun 2019. Obat yang ditemukan sering disalahgunakan yaitu obat trihexylphenidile yang sering dikonsumsi oleh anak-anak muda di kota manado. Trend ini kemungkinannya akan meningkat pada tahun yang mendatang. Bahan obat yang sering disalahgunakan yaitu sildenafil sitrat yang ditemukan dalam produk obat atau dicampurkan dalam jamu/obat tradisional dengan klaim untuk stamina pria.

Dari hasil Pengawasan dan penanganan perkara serta informasi terkait pelanggaran pidana terkait Obat dan Makanan yang berasal dari pihak Kepolisian berupa permohonan ahli maupun permohonan Uji Laboratorium Barang Bukti, maka dapat dipetakan lokasi rawan kasus pada tahun 2019. Pemetaan ini bersifat dinamis sebagai fakta temuan di



Gambar 3.36. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019

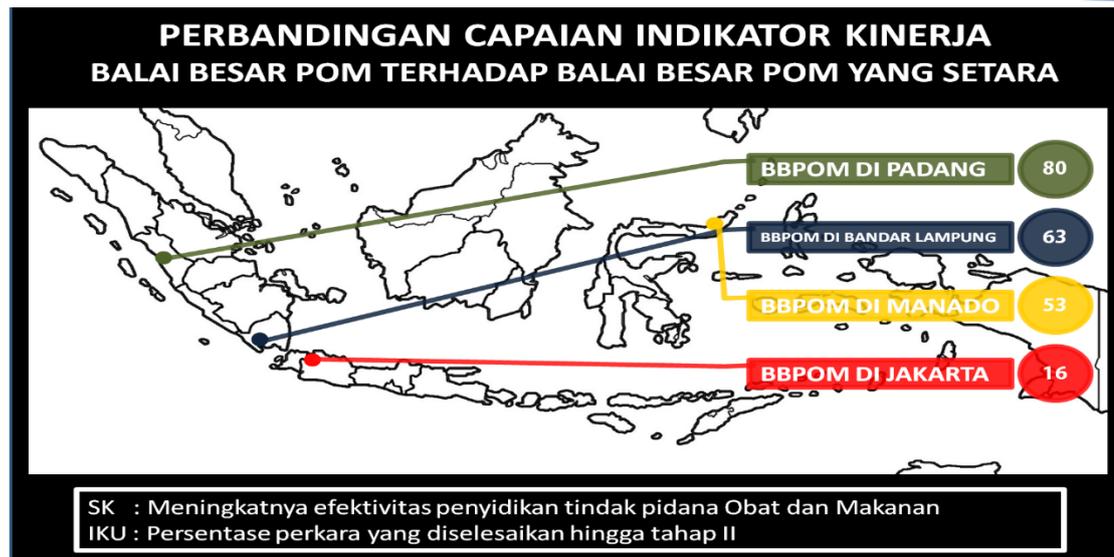
lapangan dan dapat digunakan sebagai bagian dari perencanaan dan prediksi terkait operasi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun mendatang. Dari hasil pemetaan tersebut diketahui Kota Manado, Kota

Kotamobagu dan Tahuna di Kab. Kepulauan Sangihe sebagai daerah dengan rawan kasus Obat dan Makanan Tertinggi di Sulawesi Utara. Kota Manado sebagai Pusat Pemerintahan dan Bisnis di Sulawesi Utara merupakan daerah yang berpotensi paling tinggi, hal ini ditunjang dari perputaran ekonomi yang cukup pesat dan manado sebagai destinasi wisata bagi turis asal Tiongkok. Selanjutnya, Kota Kotamobagu merupakan daerah yang berpotensi ditemukannya obat tradisional ilegal mengandung Bahan Kimia Obat. Hal ini didukung konsumsi jamu di daerah tersebut cukup tinggi dibandingkan di wilayah lain di Sulawesi Utara yang disebabkan adanya warga transmigrasi dari pulau Jawa dan Bali. Kemudian Tahuna di Kab. Kepulauan Sangihe sebagai pintu masuk dari Filipina, berpotensi masuknya barang ilegal dari luar negeri. Selain di tiga lokasi tersebut, daerah dengan kerawanan kasus sedang yaitu kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa. Kota Bitung sebagai Pintu Masuk jalur laut dimana Pelabuhan Bitung telah ditetapkan sebagai salah satu pelabuhan yang dapat beroperasi sebagai pintu masuk barang impor, hal ini berpotensi ditemukannya Obat dan Makanan Ilegal didukung pula dengan perputaran ekonomi yang signifikan di Bitung. Kemudian Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penyangga kota Manado dengan potensi dapat digunakan oleh pelaku

kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai tempat penyimpanan. Tantangan lain yang dihadapi dalam waktu dekat ini yaitu perkembangan industry 4.0 juga berpengaruh terhadap peredaran obat dan makanan illegal. Saat ini peredaran Obat dan Makanan illegal sudah mulai diedarkan melalui media online, sehingga barang tersebut dapat dikirim langsung oleh penjual diluar Provinsi Sulawesi Utara langsung diterima oleh pembeli melalui jasa ekspedisi. Menjadi tantangan bagi penyidik BBPOM di Manado untuk meningkatkan kompetensi petugas, terutama dibidang IT sehingga bisa dilaksanakan *cyber patrol* untuk memantau jual beli produk Obat dan Makanan illegal yang tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Dari 9 perkara yang ditangani pada tahun 2019, dua perkara terkait obat stamina pria dan kosmetik merupakan hasil penelusuran via internet terkait penjualan Obat dan Makanan ilegal di Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil penelusuran informasi yang beredar di internet terkait penjualan obat dan makanan ilegal di wilayah Provinsi Sulawesi Utara masih didominasi pemain dari luar Provinsi Sulawesi Utara yang langsung mengirimkan Obat dan Makanan ilegal kepada penggunanya.

Dalam proses pemberkasan perkara, koordinasi dan komunikasi dengan pihak kejaksaan perlu dilanjutkan dalam bentuk pertemuan untuk menyamakan persepsi agar dalam penyelesaian berkas perkara hingga tahap II tetap berjalan dengan baik. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan obat dan makanan dengan melihat putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan masih sangat rendah. Oleh karena itu perlu koordinasi dalam bentuk pertemuan dengan CJS (*Criminal Justice System*) dalam hal ini para hakim untuk memberikan masukan mengenai bahaya yang ditimbulkan dalam tubuh apabila mengkonsumsi Obat dan Makanan yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Tanpa Izin Edar.

Dalam perbandingan kinerja antar balai yang dikelompokkan dalam satu *cluster*, maka BBPOM di Manado dievaluasi dengan membandingkan capaian kinerjanya dengan Balai Besar Lainnya yaitu, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Padang dan Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagaimana terlihat dalam gambar 3.37



Gambar 3.37 Perbandingan Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II dalam Satu Cluster

Berdasarkan hasil realisasi, BBPOM di Manado memiliki capaian kinerja dengan indikator kinerja utama persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II yaitu, 52,94 % dengan target 50 %; sementara Balai Besar POM di Padang memiliki capaian 80 % dengan target 65 %; Balai Besar POM di Bandar Lampung memiliki Capaian Kinerja 63,64 % dengan Target 50 % dan Balai Besar POM di Jakarta memiliki capaian 15,79 % dengan target 50 %. Target nasional untuk indikator ini sama dengan target yang ditetapkan untuk semua Balai yaitu 50 %. Berdasarkan hasil capaian tersebut tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa BBPOM di Manado lebih baik daripada Balai Besar POM di Jakarta meski hasil capaian kinerjanya BBPOM di Manado lebih tinggi dari Balai Besar POM di Jakarta. Begitu juga dengan capaian Balai Besar POM di Padang maupun Bandar Lampung dari segi capaian kinerja lebih baik daripada BBPOM di Manado, namun tidak dapat langsung disimpulkan bahwa BBPOM di Manado lebih buruk hasil kinerjanya. Fungsi perbandingan capaian kinerja ini berfungsi sebagai media untuk saling mempelajari strategi masing-masing balai dalam upaya mencapai capaian kinerjanya. Selain itu juga untuk melihat perbedaan kompleksitas permasalahan di masing-masing wilayah penanganan perkara karena faktor eksternal dominan dalam mempengaruhi capaian kinerja. Namun Hal tersebut secara umum dapat

dikendalikan melalui pengendalian internal seperti kebijakan pimpinan, integritas pegawai, pengembangan pegawai, ketertiban administrasi pemberkasan serta komunikasi dengan stakeholder terutama dengan lembaga *Criminal Justice System* di wilayah masing-masing.

Capaian Kinerja Perkara dipengaruhi oleh pola distribusi obat dan makanan ilegal, hal ini mempengaruhi penetapan target jumlah perkara yang ditangani. Dari hasil pemetaan rawan kasus, terkait peredaran obat, kosmetik dan obat tradisional ilegal maka posisi Sulawesi Utara berada di rantai akhir peredaran sehingga temuan nilai ekonomi barang bukti tidak terlalu besar. Hal ini didukung dengan semakin mudahnya jasa ekspedisi sehingga pelaku kejahatan obat dan makanan hanya memiliki jumlah barang yang sedikit dan mengutamakan aliran barang yang sedikit namun rutin.

Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

A.6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

Sasaran Kegiatan ke-6 yaitu terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian nilai Nilai AKIP BBPOM di Manado.

A.6.1. Nilai AKIP BBPOM di Manado

Tabel 3.21 Nilai AKIP BBPOM di Manado

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BBPOM di Manado	81	74,6	92,1	Baik

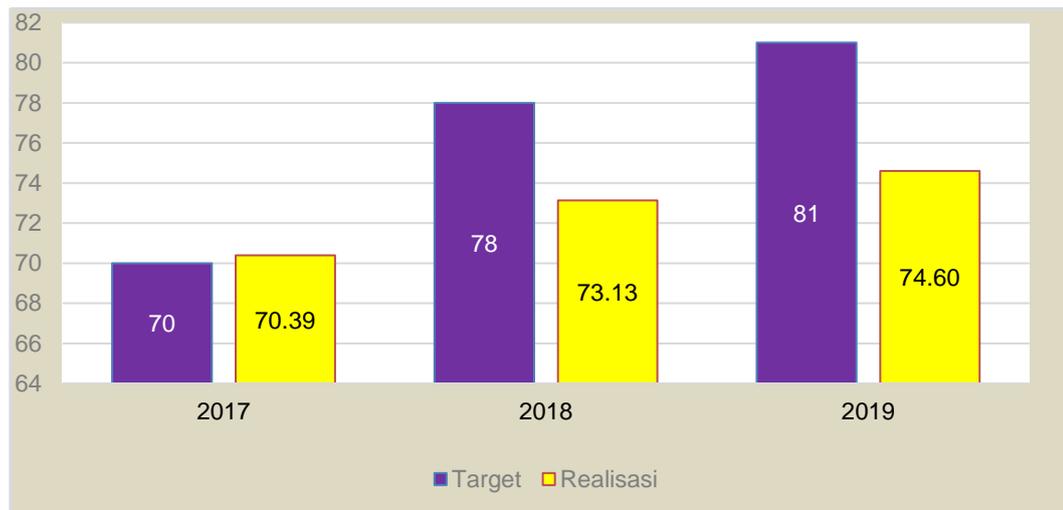
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Manado adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk BBPOM di Manado dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel 3.22 . Kategori Penilaian SAKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4	> 60 s.d 70	B	Baik
5	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6	> 30 s.d 50	C	Agak Kurang
7	< 30	D	Kurang

Penilaian SAKIP BBPOM di Manado Tahun 2019 berdasarkan atas hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama BPOM adalah 76,40 (sangat baik/BB) dengan capaian Indikator Kinerja sebesar 92,10% terhadap target sehingga dapat dimasukkan dalam kriteria Baik.

Berdasarkan gambar 3.38, pada tahun 2019 target Indikator Kinerja untuk Nilai AKIP BBPOM di Manado naik menjadi 81 dari target tahun 2018 sebesar 78. Capaian nilai AKIP BBPOM di Manado tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan secara berkelanjutan dalam hal pengelolaan dan penguatan sistem akuntabilitas.



Gambar 3.38 Nilai AKIP BBPOM di Manado Tahun 2017 – 2019

Pada Tahun 2019, dibandingkan dengan BBPOM lain dalam satu *cluster*, ke empat BBPOM belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan di akhir RPJMN 2015 – 2019. Nilai AKIP BBPOM di Manado, lebih tinggi dari nilai BBPOM Bandar Lampung, namun masih lebih rendah dari nilai BBPOM Jakarta dan BBPOM Padang seperti terlihat pada gambar 3.39



Gambar 3.39 Perbandingan Nilai AKIP dalam Satu Cluster

Penguatan sistem akuntabilitas yang telah dilakukan oleh BBPOM di Manado pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. BBPOM di Manado melakukan pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e – performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e- SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodic triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya;
2. BBPOM di Manado menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap data informasi kinerja yang dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh BPOM;
3. Mengunggah / mengentry data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya melalui aplikasi e-performance, monev SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas, serta bit.ly/realisasitriwulan2019;
4. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan;
5. Penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten di BBPOM di Manado dengan meraih sertifikat ISO 9001 : 2015 melalui audit resertifikasi oleh TUV Rheinland pada tanggal 11 September 2019 serta sertifikat ISO/IEC 17025 : 2017 reakreditasi oleh Komite

Akreditasi Nasional (KAN) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi pengujian dan laboratorium kalibrasi pada tanggal 24 April 2019;

6. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan membentuk Tim Kerja Zona Integritas untuk menjadi motor dalam melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan dan inovasi.

Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BBPOM di Manado secara terus-menerus melaksanakan berbagai upaya perbaikan di semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja. Perbaikan tersebut mulai dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja hingga capaian kinerja. Upaya perbaikan memperhatikan secara cermat hasil penilaian akuntabilitas kinerja yang menjadi catatan penting evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM. Tabel 3.21 menunjukkan upaya tindak lanjut atas Rekomendasi nilai AKIP tahun sebelumnya.

Tabel 3.23 Tindak Lanjut atas rekomendasi Nilai AKIP

No	Rekomendasi Nilai AKIP	Tindak Lanjut
1	Publikasi Renstra pada Website/subsite resmi atau media lain yang memudahkan public untuk mengakses	Media penyampaian informasi kepada public secara online atas kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Manado melalui website www.bbpom-manado.id yang dibangun secara mandiri BBPOM di Manado. Penyampaian informasi terkait kinerja BBPOM di Manado dapat di lihat pada menu Pelaporan . Publikasi laporan meliputi Rencana

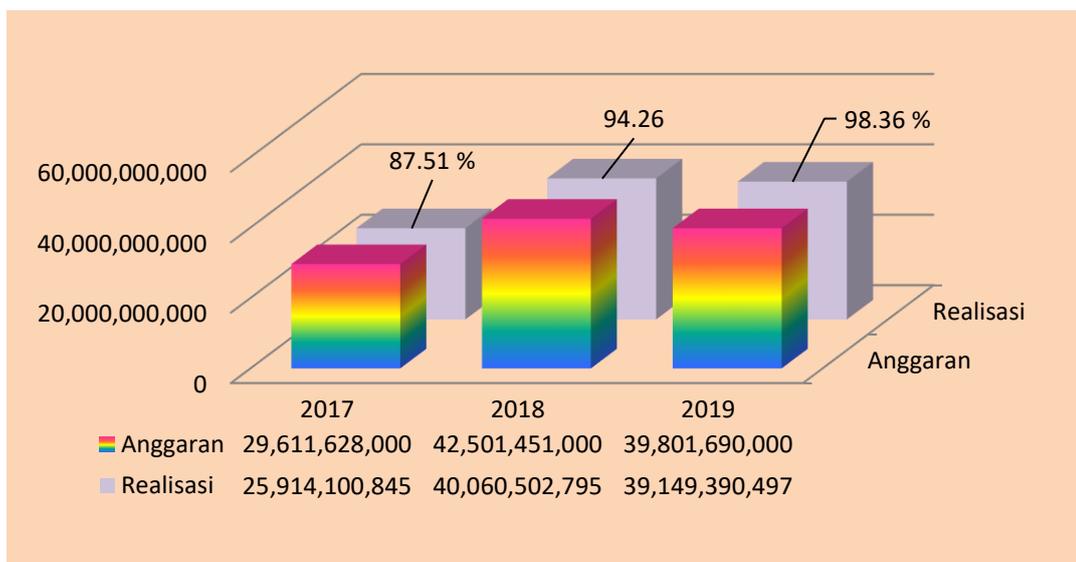
		Strategis 2015 - 2019, Laporan Tahunan n-1, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah n-1, Perjanjian Kinerja Tahun n. Selain publikasi melalui website, BBPOM di Manado juga mempublikasikan kegiatan-kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan melalui media sosial lainnya, seperti Instagram, Facebook dan Twitter.
2	Menjabarkan target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan menjadi target periodic dalam rencana aksi serta mencantumkan sub kegiatan/sub komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Target kinerja tahunan telah dijabarkan pada target kinerja periodik melalui Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulanan
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodic serta memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment	BBPOM di Manado telah melakukan evaluasi capaian kinerja secara periodic melalui pengelolaan data kinerja yang terintegrasi secara elektronik melalui pemanfaatan aplikasi e – <i>performance</i> untuk pengukuran kinerja yang tercascading dari level eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4. Pengukuran ini pun di integrasikan dengan aplikasi e- SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodic triwulanan dimana penilaian pengukuran

		kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
4	Membuat mekanisme pengumpulan data yang up to date, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	BBPOM di Manado telah melakukan penunjukan petugas yang bertanggung jawab terhadap data informasi kinerja dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh BPOM, mekanisme pengumpulan data kinerja yang up to date, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui entry data-data capaian kinerja yang di laporkan secara online melalui aplikasi e-performace, monev SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas, bit.ly/capaianrapk2019 , serta bit.ly/realisasitriwulan2019 .
5	Menyempurnakan pelaksanaan evaluasi internal untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan memuat hasil evaluasi yang memuat kendala/hambatan, Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) untuk mengatasi kendala/hambatan serta monitoring RATL pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.	BBPOM di Manado telah melakukan penyempurnaan evaluasi internal secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan. Evaluasi salah satu nya dilakukan melalui bit.ly/realisasitriwulan2019 , dimana pada bit.ly tersebut termuat kendala/hambatan atas capaian

		triwulanan serta Rencana Tindak Lanjutnya.. Identifikasi atas kendala pencapaian kinerja juga dilakukan melalui monitor atas capaian kinerja pada level eselon 3 dan eselon 4 BBPOM di Manado pertriwulan.
--	--	--

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 BBPOM di Manado mendapatkan anggaran sebesar Rp. 38.404.651.000,00 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2019 Nomor : SP DIPA- 063.01.2.432901/2019 tanggal 5 Desember 2018. Anggaran tersebut turun sebesar Rp. 4.096.800.000,00 dibandingkan anggaran tahun 2018. Selama periode berjalan di tahun 2019 BBPOM di Manado telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak dua kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Pada tanggal 2 Agustus 2019, BBPOM di Manado mendapatkan tambahan anggaran untuk keperluan Diklat Dasar CPNS TA 2019 sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 39.049.251.000,00. Pada tanggal 13 September 2019, BBPOM di Manado kembali mendapatkan tambahan anggaran untuk Revisi Belanja Pegawai sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 39.801.690.000,00. Realisasi Anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp. 39.149.390.497 atau mencapai 98,36 % dari alokasi anggaran. Persentase realisasi anggaran pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,1 % dibandingkan dengan tahun 2018.



Gambar 3.40 Realisasi Anggaran Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2017 – 2019

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan BBPOM di Manado Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara	1.349.505.000	1.324.477.230	98,15
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	212.416.000	209.904.289	98,82
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	3.668.078.000	3.610.399.304	98,43
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Utara	7.752.591.000	7.526.439.822	97,08
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB/BPOM di Manado	1.065.529.000	1.014.808.420	95,24
6	Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	25.753.571.000	25.463.361.432	98,87

BBPOM di Manado senantiasa memperbaiki pengelolaan anggaran berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan anggaran yang sehat di lingkungan pemerintahan. Upaya – upaya dilakukan oleh BBPOM di Manado untuk meningkatkan realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja BBPOM di Manado sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Manado antara lain :

1. Melakukan optimalisasi serta langkah antisipasi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian anggaran melalui revisi anggaran;
2. Melakukan koreksi jika ada penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan, ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana;
3. Komitmen dari para penanggungjawab kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian anggaran melalui penandatanganan komitmen capaian anggaran 96 % atas pagu anggaran dari level eselon 3 sampai dengan level eselon 4;
4. Pelaksanaan evaluasi anggaran dilaksanakan secara periodik dan berkala dari penanggungjawab kegiatan.

3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan.

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai dengan rumus :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%}$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Tingkat efisiensi kegiatan per sasaran kegiatan BBPOM di Manado tahun 2019 secara umum dapat dilihat dari tabel 3.9

Tabel 3.25. Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan BBPOM di Manado Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	TE	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado	0,01	EFISIEN
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	0,10	EFISIEN
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	0,08	EFISIEN
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado	0,02	EFISIEN
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	-0,03	TIDAK EFISIEN
6	Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	0,01	EFISIEN

Berdasarkan perhitungan efisiensi, sasaran kegiatan yang efisiensinya paling rendah terdapat pada sasaran kegiatan 5 yaitu “Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado” hal ini disebabkan karena capaian output yang mendukung sasaran kegiatan ini tidak tercapai, dari 10 perkara yang ditargetnya hasil capaian outputnya hanya 9 perkara Pada pelaksanaan

output ini ditemukan 34 kasus terkait tindak pidana obat dan makanan yang ditangani BBPOM di Manado bersama Loka POM di Sangihe. Dari temuan tersebut 9 kasus diprojusticia, sedangkan sisanya tidak diprojusticia dengan berbagai pertimbangan diantaranya dampak yang ditimbulkan masih kecil dan dapat dibina untuk tidak menjual produk obat dan makanan ilegal.

Beberapa penyebab tidak tercapai target tersebut dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Perkara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipaksakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek pada saat gelar perkara serta mengedepankan pembinaan bagi pelaku usaha;
2. Sulawesi Utara merupakan salah satu target pasar obat dan makanan ilegal di kawasan Indonesia timur dan berada di rantai terakhir peredaran obat dan makanan, sehingga dari hasil pengawasan lebih banyak sebagai distributor kecil yang masih perlu dibina dan belum ditemukan produsen obat dan makanan ilegal;
3. Selama tahun 2019, tidak hanya mengerjakan perkara tahun 2019 tetapi menyelesaikan juga Pemberkasan yang carry over sejak tahun 2017 yang harus segera diselesaikan yaitu sejumlah 7 perkara dengan hasil akhir sudah 6 perkara yang tahap. II pada Desember 2019 dan menunggu jadwal sidang dari pengadilan.

Terdapat korelasi positif antara pencapaian sasaran kegiatan *“Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado”* dengan sasaran kegiatan kedua *“Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado”* yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi dengan capaian indikator yang dihasilkan berupa Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Sulawesi Utara sebesar 89,44 yang merupakan **“Peringkat Pertama Nasional”**.

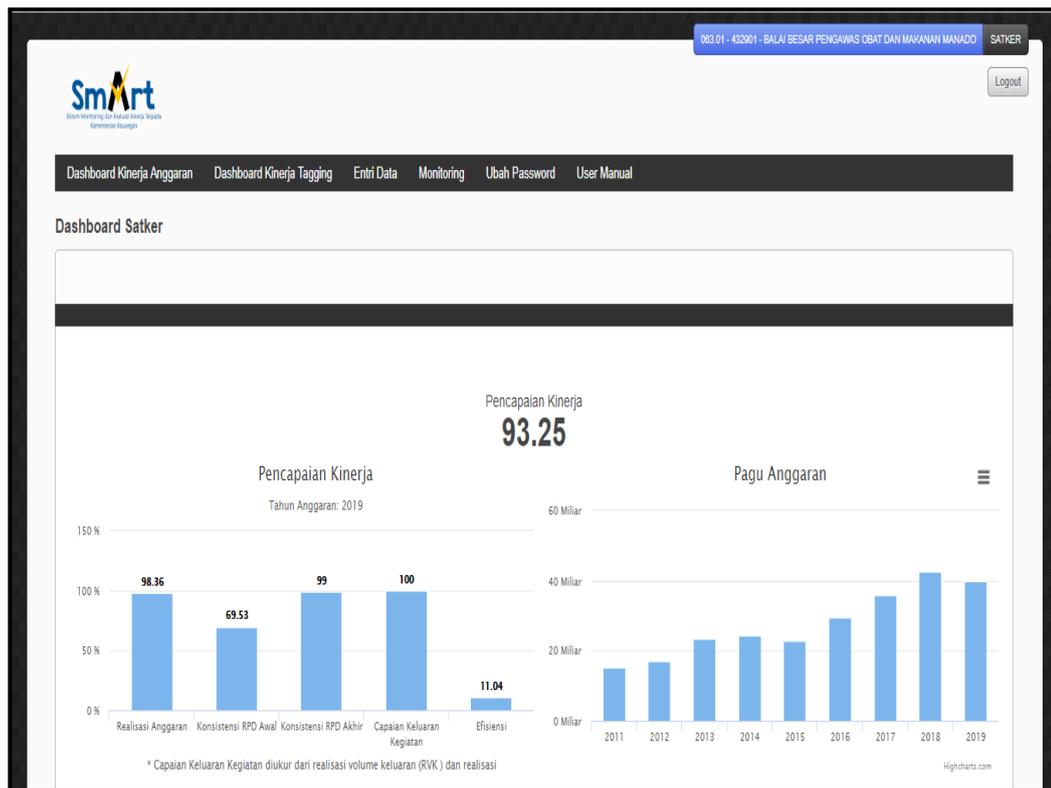
Berdasarkan besarnya anggaran untuk kegiatan pengawasan obat dan makanan di BBPOM di Manado dapat diperoleh hasil perhitungan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan 1 yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan capaian rata-rata dari tiap indikator dicapai 112,78% terhadap target yang ditetapkan, dengan total anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran kegiatan sebesar Rp1.349.505.000,- kemudian total realisasi sebesar Rp. 1.324.477.230,- dengan persentase realisasi anggaran 98,15%. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Tingkat Efisiensi yaitu 0,01 dan dikategori EFISIEN.
2. Sasaran Kegiatan 2 yaitu Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan capaian terhadap target sebesar 126,86% terhadap target yang ditetapkan, dengan total anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran kegiatan sebesar Rp. 212.416.000,- kemudian total realisasi sebesar Rp. 209.904.289,- persentase realisasi anggaran 99,82%. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Tingkat Efisiensi yaitu 0.10 dan dikategori EFISIEN.
3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan capaian terhadap target sebesar 128,31 % terhadap target yang ditetapkan , total anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran kegiatan sebesar Rp. 3.668.078.000,- kemudian total realisasi sebesar Rp. 3.610.399.304,- persentase realisasi anggaran 98,43%. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Tingkat Efisiensi yaitu 0.08 dan dikategori EFISIEN.
4. Sasaran kegiatan ke empat yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan capaian 113,21% terhadap target yang

ditetapkan. total anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran kegiatan sebesar Rp. 7.752.591.000,- dengan realisasi yaitu sebesar Rp. 7.526.439.822,- persentase realisasi anggaran 97,08%. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Tingkat Efisiensi yaitu 0,02 dan dikategori EFISIEN.

5. Sasaran Kegiatan ke 5 yaitu Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan capaian 105,88% terhadap target yang ditetapkan. total anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran kegiatan sebesar Rp. 1.065.529.000,- dengan realisasi yaitu sebesar Rp. 1.014.808.420,- persentase realisasi anggaran 95,24%. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Tingkat Efisiensi yaitu -0,03 dan dikategori TIDAK EFISIEN.
6. Sasaran Kegiatan ke 6 yaitu Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 diperoleh persentase capaian sebesar 92,10 % terhadap target yang ditetapkan yaitu 81. Total anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran kegiatan sebesar Rp. 25.753.571.000,- dengan realisasi yaitu sebesar Rp. 25.463.361.432,- persentase realisasi anggaran 98,87%. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Tingkat Efisiensi yaitu 0,01 dan dikategori EFISIEN.

Perhitungan tingkat efisiensi diatas didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang berupa anggaran. Untuk selanjutnya diperlukan pertimbangan *input* yang lain serta dukungan data yang lebih memadai.



Gambar 3.41 Capaian Kinerja BBPOM di Manado berdasarkan Aplikasi SMART DJA Tahun 2019

Capaian kinerja BBPOM di Manado berdasarkan aplikasi SMART DJA yang dapat diakses melalui monev.anggaran.kemenkeu.go.id diperoleh nilai 93,25. Capaian tersebut lebih tinggi 7,95 poin dibandingkan tahun 2018. Monitoring dan evaluasi dapat dijadikan dasar dalam menilai apakah kegiatan di BBPOM di Manado telah berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan serta upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan pengukuran capaian kinerja output fisik kegiatan ini, diharapkan penanggungjawab kegiatan dapat menggunakannya sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Perhitungan capaian kinerja monev SMART tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2011 bahwa Evaluasi Kinerja terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu : (1) implementasi, (2) manfaat, dan

- (3) evaluasi implementasi yang diukur menggunakan empat indikator, yaitu
- (a) penyerapan anggaran, (b) konsistensi perencanaan dan implementasi,
 - (c) pencapaian output, dan (d) efisiensi.

BAB IV PENUTUP

1.6 KESIMPULAN

Laporan Kinerja BBPOM di Manado Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran kegiatan BBPOM di Manado dan perbandingan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta perbandingan dengan Balai lain dalam satu *cluster*. Secara umum capaian sasaran kegiatan menunjukkan perkembangan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen di lingkungan BBPOM di Manado.

Capaian kinerja tiap sasaran kegiatan BBPOM di Manado pada tahun 2019 yang diukur melalui 16 Indikator Kinerja disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 6 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra BBPOM di Manado Tahun 2015-2019, 2 sasaran kegiatan masuk kategori “Sangat baik”, 2 sasaran kegiatan masuk kategori baik, 2 sasaran kegiatan masuk kategori tidak dapat disimpulkan.
2. Capaian sasaran kegiatan pertama yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado sebesar 112,78% dengan kriteria “Sangat Baik”.
3. Capaian sasaran kegiatan kedua yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado sebesar 126,86% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.
4. Capaian sasaran kegiatan ketiga yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado sebesar 128,31% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.
5. Capaian sasaran kegiatan keempat yaitu meningkatnya efektivitas

pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado sebesar 113,21 % dengan kriteria “Sangat Baik”.

6. Capaian sasaran kegiatan kelima yaitu menguatnya penegakan hukum di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado sebesar 105.88 % dengan kriteria “Baik”.
7. Capaian sasaran kegiatan keenam yaitu terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 sebesar 92.10 % dengan kriteria “Baik”.

Realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 39.149.390.497,00 atau 98,36% dari total pagu anggaran Rp.39.801.690.000,00. Tingkat efisiensi sasaran kegiatan berdasarkan realisasi anggaran disimpulkan bahwa yang dari 6 sasaran kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 terdapat 1 sasaran kegiatan yang Tidak Efisien.

Dalam pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi dari perencanaan, dan pelaksanaan hingga monitoring evaluasi kinerja dilakukan oleh BBPOM di Manado. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mendukung tercapainya sasaran kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis 2015-2019 akan dilakukan revaluasi atas capaian kinerja secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

6.2 . SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2019, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap target Indikator Kinerja Utama Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan

Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado agar capaiannya tidak melebihi 120%;

2. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap target Indikator Kinerja Utama Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado supaya capaiannya tidak melebihi 120%;
4. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap target Indikator Kinerja Utama Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado supaya capaiannya tidak melebihi 120%;
5. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap target Indikator Kinerja Utama Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado supaya capaiannya tidak melebihi 120%.

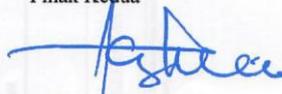
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANADO**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	71
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	94%
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	60%
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	80%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	87%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	71%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	61
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	66
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	61
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Utara	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Utara	100%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	50%
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	50%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Utara	90%
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado	46,95
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Manado	50 %
6	Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM	81

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 38.404.651.000,-

Manado, 17 Desember 2018

Pihak Kedua



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Pertama



Dr. Saundra M.P. Linthin, Apt., M.Kes



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado

Jl. Raya Manado – Tomohon Km. 7 Pineleng Sulawesi Utara, Telp. (0431)824686, 824327
 Faks. (0431)824327, 824210 email : nommanado@vahoo.co.id link : mds@vahoo.co.id www : nom.co.id

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANADO**

No	Perspektif	SASARAN KEGIATAN	URAIAN KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAR 2019	TARGET					REALISASI	KET.
						B3	B6	B9	B12	B3		
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado	1.1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado*	%	71	-	-	-	71			
			1.2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	94%	94%	94%	94%				
			1.3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	60%	60%	60%	60%				
			1.4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	80%	80%	80%	80%				
			1.5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	87%	87%	87%	87%				
			1.6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	71%	71%	71%	71%				
2	Customer	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	2.1. Indeks Kepuasan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado*	-	61	-	-	-	61			
			2.2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado*	-	66	-	-	-	66			
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	3.1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado*	-	61	-	-	-	61			
			4.1. Persentase penemuan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Utara	%	100%	100%	100%	100%				
			4.2. Persentase jumlah produk Obat dan Makanan yang memenuhi kriteria di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%				
			4.3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%				
			4.4. Persentase kepatuhan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%				
4	Learning & Growth	Meningkatnya efektivitas pengolahan tindak lanjut pelanggaran di wilayah kerja BBPOM di Manado Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BBPOM 2015 - 2019	4.5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	46,95%	46,95%	46,95%	46,95%	46,95%			
			5.1. Persentase perlakuan yang dilaksanakan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%				
6.1		Nilai AKIP BBPOM di Manado*	-	81	-	-	-	81				

Manado, 17 Desember 2018

Pihak Kedua



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.

Pihak Pertama



Dr. Sandra M.F. Linthin, Apt., M.Kes

Lampiran 2

RENCANA KINERJA TAHUN 2019 BBPOM DI MANADO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	71
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	94
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	60
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	80
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	87
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	71
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	61
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	66
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	61
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Utara	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	50
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	50
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Utara	90
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado	46,95
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB/BPOM di Manado	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Manado	50
6	Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Manado	81

Lampiran 3

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019
BBPOM DI MANADO**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	71	72.31	101.85	Baik
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	94	86.07	91.56	Baik
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	60	92.38	153.97	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	80	83.52	104.40	Baik
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	87	92.86	106.73	Baik
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	71	83.91	118.18	Sangat Baik
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	61	89.44	146.62	Tidak Dapat Disimpulkan
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	66	69.35	105.08	Baik
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	61	78.27	128.31	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Utara	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Utara	100	95.05	95.05	Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	50	68.87	137.74	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	50	55.31	110.63	Sangat Baik
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Utara	90	88.37	98.19	Baik
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado	46.95	58.43	124.45	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB/BPOM di Manado	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Manado	50	52.94	105.88	Baik
6	Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Manado	81	74.6	92.10	Baik

Lampiran 4
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI MANADO 2019

INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2019	TARGET				REALISASI			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
URAIAN	SATUAN										
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado											
1.1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado*	-	71	-	-	-	71	-			72.31
1.2.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	94	94	94	94	94	96.69	98.50	89.97	86.07
1.3.	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	60	60	60	60	60	96.15	98.51	95.62	92.38
1.4.	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	80	80	80	80	80	94.56	97.95	91.63	83.52
1.5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	87	87	87	87	87	100	100	98.26	92.86
1.6.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	71	71	71	71	71	74.06	83.70	93.04	93.91
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado											
2.1.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado*	-	61	-	-	-	61	-	-	-	89.44
2.2.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado*	-	66	-	-	-	66	-	-	-	69.35

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado											
3.1.	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado*	-	61	-	-	-	61	-	-	-	78.27
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado											
4.1.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Utara	%	100	100	100	100	100	91.89	95.20	100	95.05
4.2.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	50	50	50	50	50	47.83	51.92	55.88	68.87
4.3.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	50	50	50	50	50	60.37	70.07	80.88	55.31
4.4.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	90	90	90	90	90	92.31	100	97.22	88.37
4.5.	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	46,95	46,95	46,95	46,95	46,95	50	40.91	56.36	58.43
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado											
5.1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Manado	%	50	50	50	50	50	35.29	47.06	52.94	52.94
Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019											
6.1	Nilai AKIP BBPOM di Manado*	-	81	-	-	-	81	-	-	-	74.60

Lampiran 5

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019
BBPOM DI MANADO**

No	Sasaran Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado	Pengujian Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar	input : Dana output : Jumlah Sampel Makanan Yang diperiksa sesuai standar	Rp. sampel	433,187,000 750	428,808,333 752	98.99 100.27
		Pengujian Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	input : Dana output : Jumlah Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar	Rp. Sampel	916,318,000 1,829	895,668,897 1,848	97.75 101.04
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Manado	Keputusan Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	input : Dana output : Jumlah Keputusan Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Rp. Keputusan	212,416,000 36	209,904,289 39	98.82 108.33
		Kegiatan KIE Obat dan Makanan Aman	input : Dana output : Jumlah Kegiatan KIE Obat dan Makanan Aman	Rp. KIE	1,274,000,000 28	1,251,267,479 36	98.22 128.57
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	Desa Pangan Aman	input : Dana output : Jumlah Desa Pangan Aman	Rp. Desa	688,984,000 6	672,625,518 6	97.63 100.00
		Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	input : Dana output : Jumlah Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Rp. Pasar	293,985,000 5	290,692,500 5	98.88 100.00
		Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	input : Dana output : Jumlah Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Rp. Pasar	1,411,109,000 434	1,395,813,807 435	98.92 100.23
		Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	input : Dana output : Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa	Rp. Sarana	75,820,000 98	74,538,396 106	98.31 108.16
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado	Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	input : Dana output : Jumlah Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	Rp. Sarana	3,881,096,000 1560	3,711,702,344 1586	95.64 101.67
		Dukungan Teknis Laboratorium	input : Dana output : Jumlah dokumen dukungan teknis laboratorium	Rp. dokumen	2,766,145,000 1	2,734,837,837 1	98.87 100.00
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	input : Dana output : Jumlah Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Rp. keputusan	394,500,000 24	381,361,300 52	96.67 216.67
		Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	input : Dana output : Jumlah Kabupaten/Kota	Rp. Kab/Kota	635,030,000 1	623,999,945 1	98.26 100.00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyidikan Obat dan Makanan	input : Dana output : Jumlah Perkara Penyidikan Obat dan Makanan	Rp. Perkara	794,754,000 10	754,029,613 9	94.88 90.00
		Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani	input : Dana output : Jumlah Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani	Rp. Dokumen	270,775,000 1	260,778,807 1	96.31 100.00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	input : Dana output : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	Rp. Dokumen	1,710,736,000 10	1,688,936,451 10	98.73 100.00
		Pengadaan Sarana Prasarana dan Operasional di BBPOM di Manado	input : Dana output : Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja di BBPOM di Manado	Rp. Sarana	24,042,835,000 1	23,774,424,981 1	98.88 100.00

Lampiran 6

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA TAHUN 2019 BBPOM DI MANADO

No	Sasaran Kegiatan	Program/ Kegiatan	Rata-rata % Capaian Target		IE	SE	Kategori	TE
			Input	Output				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado	Pengujian Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar	98.99	100.27	1.01	1	Efisien	0.01
		Pengujian Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	97.75	101.04	1.03	1	Efisien	0.03
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Manado	Keputusan Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	98.82	108.33	1.10	1	Efisien	0.10
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	Kegiatan KIE Obat dan Makanan Aman	98.22	128.57	1.31	1	Efisien	0.31
		Desa Pangan Aman	97.63	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
		Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	98.88	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
		Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	98.92	100.23	1.01	1	Efisien	0.01
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado	Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	98.31	108.16	1.10	1	Efisien	0.10
		Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	95.64	101.67	1.06	1	Efisien	0.06
		Dukungan Teknis Laboratorium	98.87	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
		Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	96.67	216.67	2.24	1	Efisien	1.24
		Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	98.26	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Penyidikan Obat dan Makanan	94.88	90.00	0.95	1	Tidak Efisien	-0.05
		Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani	96.31	100.00	1.04	1	Efisien	0.04
6	Terwujudnya RB BBPOM di Manado sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	98.73	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
		Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja di BBPOM di Manado	98.88	100.00	1.01	1	Efisien	0.01

Lampiran 7

**PERBANDINGAN NILAI AKIP TAHUN 2019
BBPOM DI MANADO TERHADAP BBPOM YANG SETARA/SEJENIS**

NO	NAMA UNIT KERJA	KOMPONEN EVALUASI											
		PERENCANAAN KINERJA (30%)		PENGUKURAN KINERJA (25%)		PELAPORAN KINERJA (15%)		EVALUASI INTERNAL (10%)		PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA (20%)		TOTAL NILAI	
		%	ANGKA	%	ANGKA	%	ANGKA	%	ANGKA	%	ANGKA	%	ANGKA
1	BBPOM di Manado	83.83	25.15	62.52	15.63	86.27	12.94	62.40	6.24	73.25	14.65	74.61	74.61
2	BBPOM di Padang	84.33	25.30	72.52	18.13	78.73	11.81	62.70	6.27	75.20	15.04	76.55	76.55
3	BBPOM di Jakarta	81.87	24.56	70.00	17.5	85.07	12.76	80.20	8.02	71.40	14.28	77.12	77.12
4	BBPOM di Bandar Lampung	79.20	23.76	72.52	18.13	82.67	12.40	68.50	6.85	64.00	12.80	73.94	73.94